



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LLDIKTI Wilayah IX berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025. LLDIKTI Wilayah IX

pada tahun 2025 menetapkan 4 sasaran dan 9 indikator kinerja. Secara umum LLDIKTI Wilayah IX telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya masih rendahnya keikutsertaan mahasiswa PTS di LLDIKTI Wilayah IX dalam pelaksanaan MBKM serta PTS yang mendapatkan sanksi administrasi berat (pembinaan) terkendala dalam proses akreditasi. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LLDIKTI Wilayah IX pada tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan tinggi serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LLDIKTI Wilayah IX pada tahun 2025.

Makassar, 16 Januari 2026

Kepala



Andi Lukman

NIP. 196708171993031001

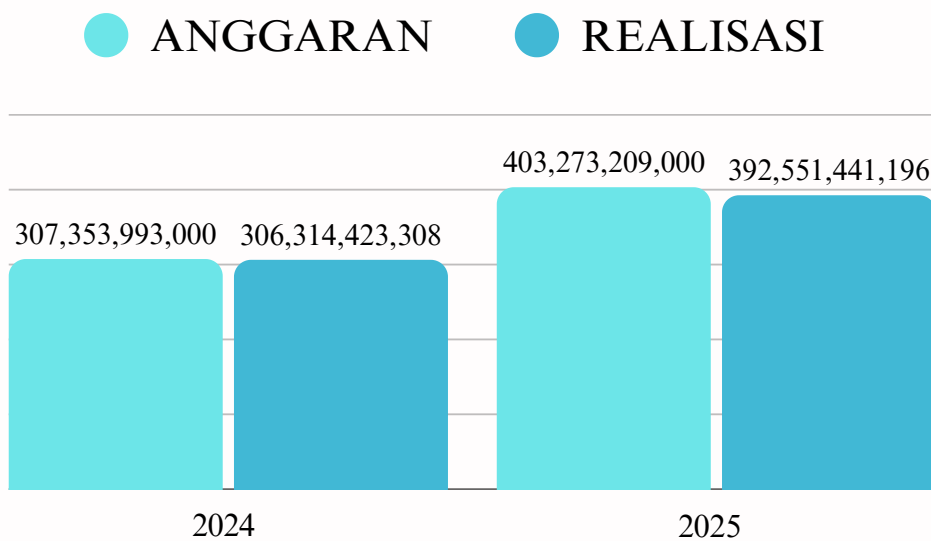
Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I Pendahuluan.	9
A. Gambaran Umum	9
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	13
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	19
BAB II Perencanaan Kinerja	21
A. Visi dan Misi	21
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	24
C. Tujuan Strategis	26
D. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	27
E. Program Prioritas	31
BAB III Akuntabilitas Kinerja	32
A. Capaian Kinerja	32
B. Realisasi Anggaran	84
1. Capaian Anggaran	84
2. Efisiensi Anggaran	85
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	86
1. Inovasi	86
2. Penghargaan	86
3. Program Crosscutting/Collaborative	88
BAB IV Penutup	93
Lampiran	96
A. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	97
1. Perjanjian Kinerja Awal	97
2. Perjanjian Kinerja Akhir	99
B. Pengukuran Kinerja	101
1. Triwulan I	101
2. Triwulan II	107
3. Triwulan III	113
4. Triwulan IV	120
C. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	127
D. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu	129

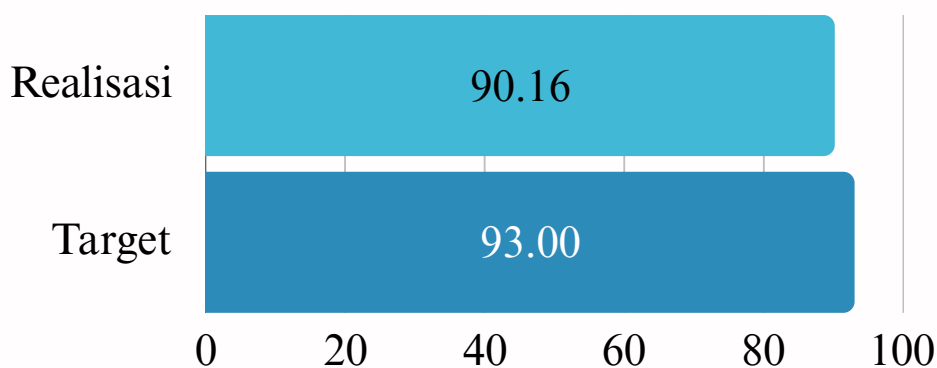
Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 4 sasaran dengan 9 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Tingkat capaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

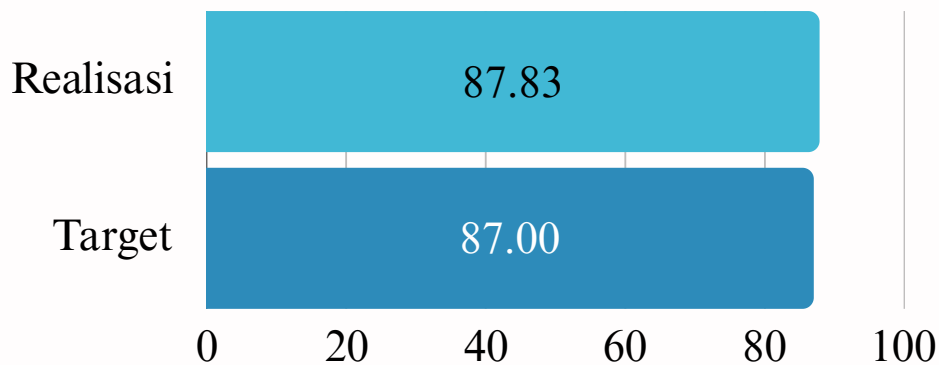
Gambar 1. Perbandingan PAGU dan Realisasi 2024 dan 2025



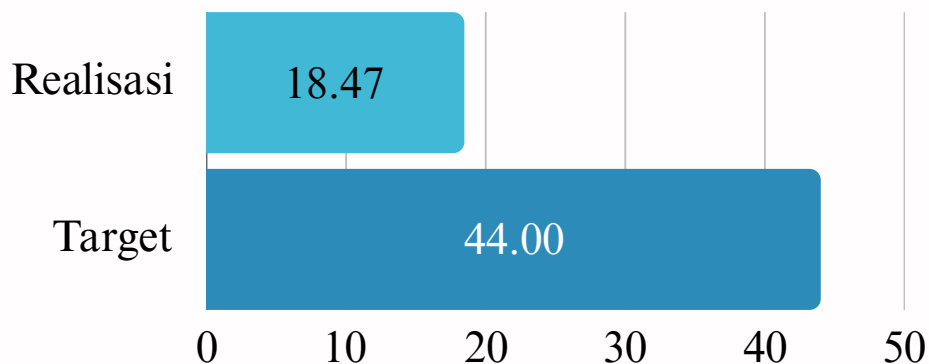
Gambar 2. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.1 Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Utama



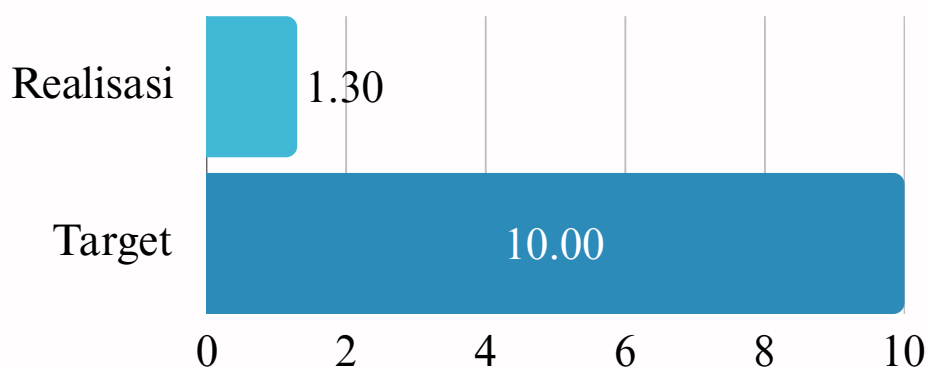
Gambar 3. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain



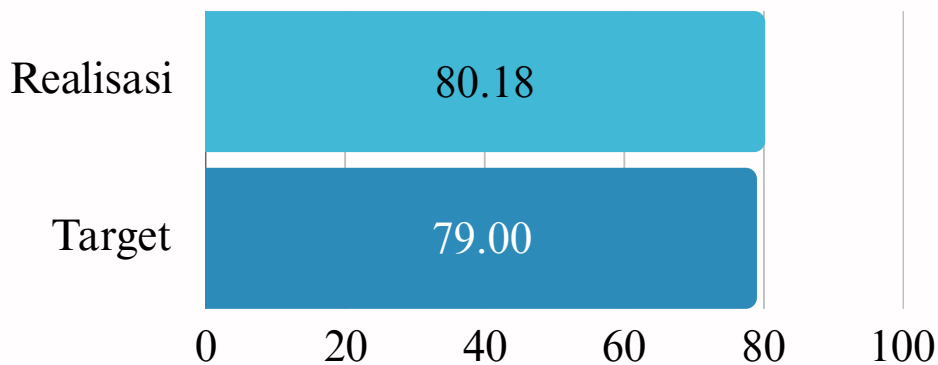
Gambar 4. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi



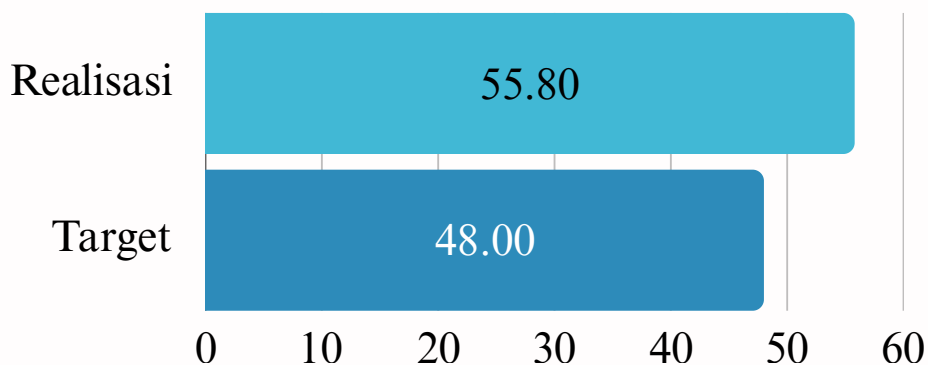
Gambar 5. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi



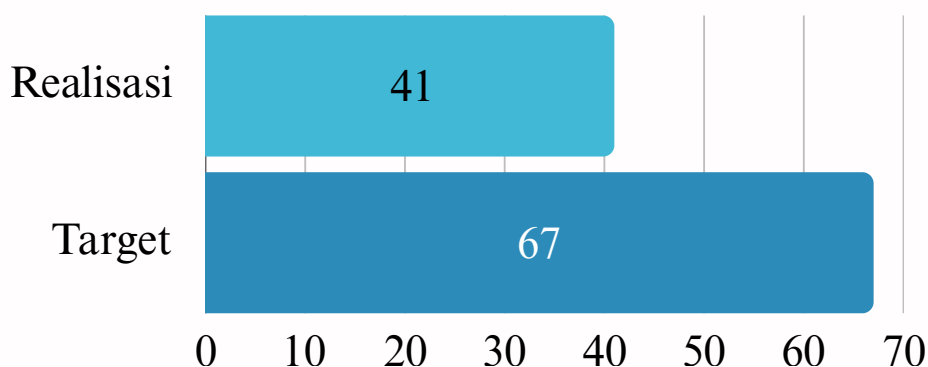
Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi



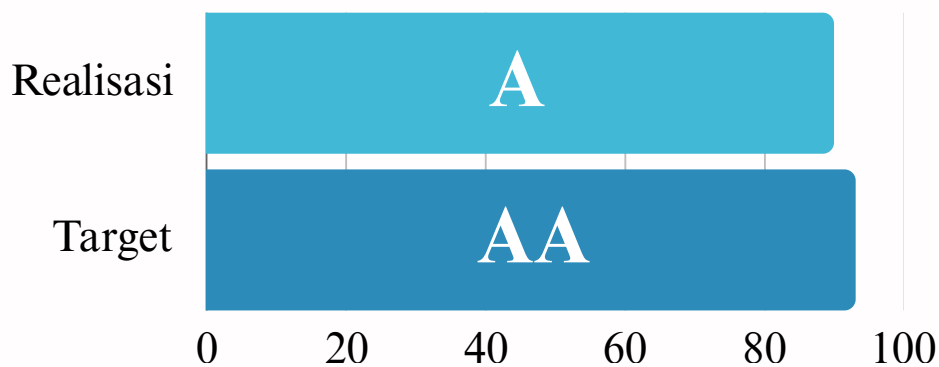
Gambar 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus



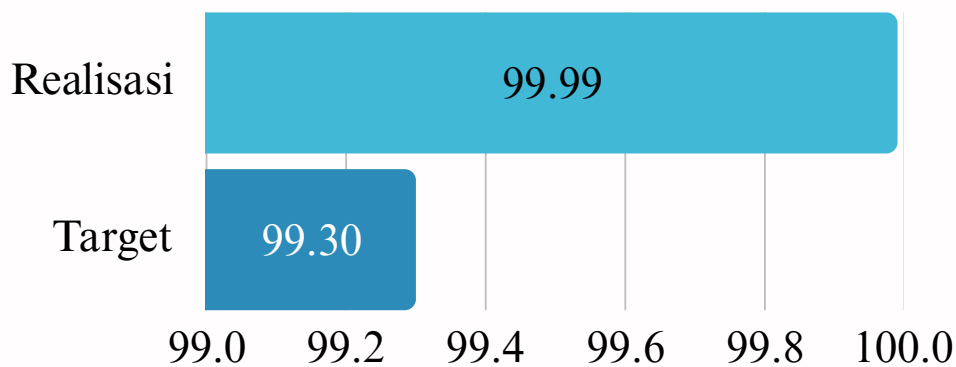
Gambar 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra



Gambar 9. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4.1 Predikat SAKIP



Gambar 10. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Kebijakan MBKM diawal tahun 2025 diganti dengan Kampus berdampak, sehingga sebahagian perguruan tinggi tidak lagi melanjutkan program MBKM di kampus;
2. Penambahan jumlah persentase data mahasiswa berprestasi belum terjadi kenaikan disebabkan data mahasiswa berprestasi belum diberikan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek
3. Masih banyaknya temuan Itjen dan BPK terkait penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar terkait penerima yang tidak memenuhi syarat;
4. Pemberian reward dan punishment belum digunakan sebagai evaluasi kinerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

- 1 Menghubungi PTS untuk melakukan pelaporan baik melalui link Google Form maupun melalui klinik PDDIKTI terkait pelaporan kegiatan MBKM pada Neofeeder PDDIKTI;
- 2 Beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk mendukung partisipasi mahasiswa dalam program kreativitas mahasiswa;
- 3 Melakukan evaluasi standar operasional prosedur penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar;
- 4 Menyusun pedoman pemberian *reward* dan *punishment* yang akan mulai diimplementasikan bulan Januari 2026

Metode Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja tahun 2025 telah dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1 Pembaharuan SOP pengumpulan Data kinerja
- 2 Penerbitan SK Tim Penyusun Lakin
- 3 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIN yang menghadirkan seluruh penanggungjawab IKK



BAB 1

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan LLDIKTI adalah unit kerja dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bertugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di wilayah kerjanya masing-masing, dimana lingkup kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

LLDIKTI Wilayah IX sampai saat ini melayani

222 Perguruan tinggi yang tersebar di :

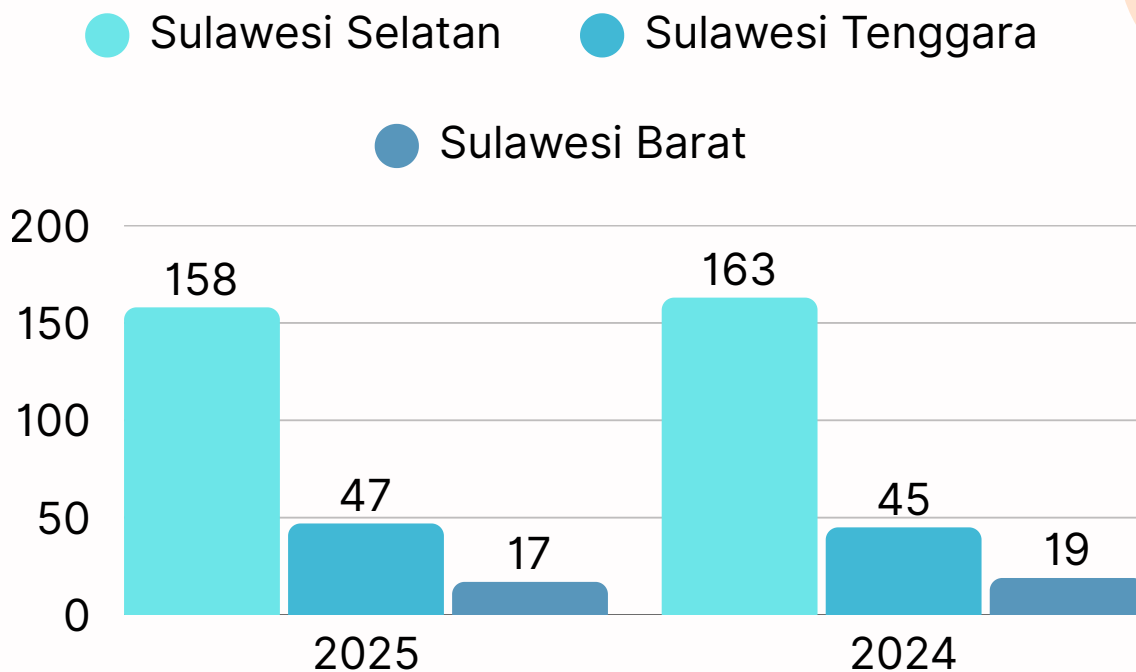
158 PTS Di Provinsi Sulawesi Selatan

47 PTS Di Provinsi Sulawesi Tenggara

17 PTS Di Provinsi Sulawesi Barat

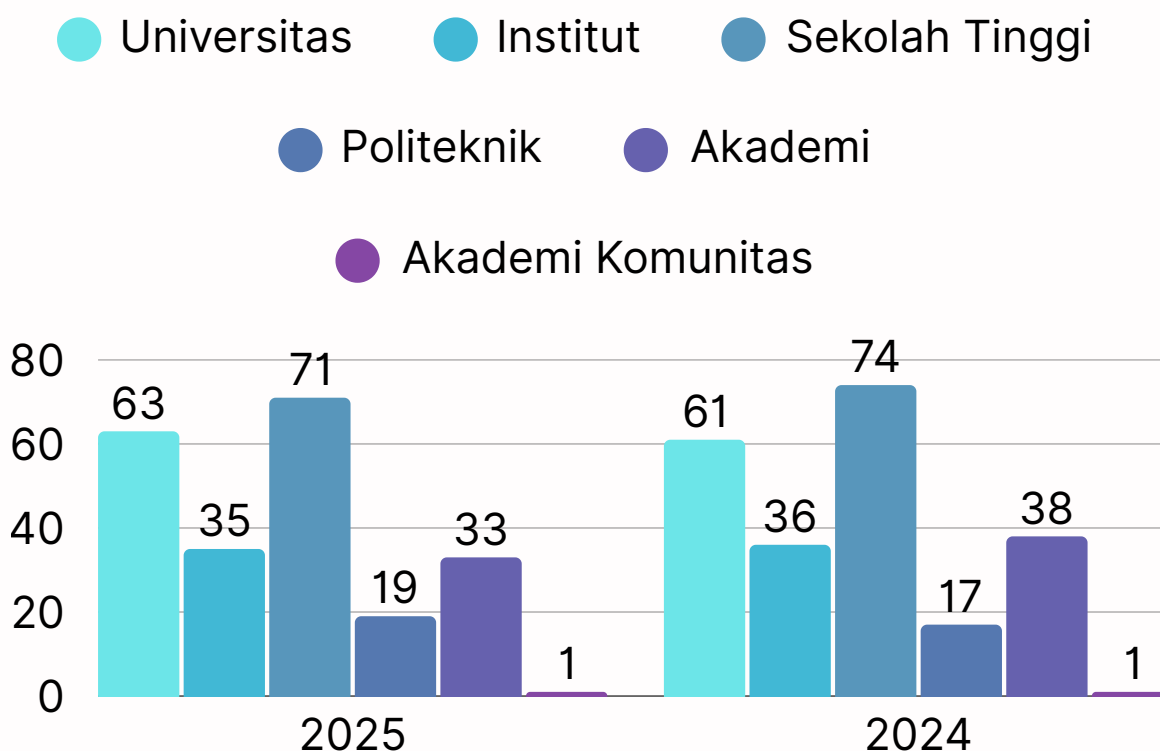
Yang terdiri dari **63** Universitas, **35** Institut, **71** Sekolah Tinggi, **19** Politeknik, **33** Akademi dan **1** Akademi Komunitas, dengan jumlah **1.549** program studi, jumlah mahasiswa aktif sebanyak **315.223** mahasiswa, serta dosen yang terdiri dari dosen dipekerjakan sebanyak **614** dosen dan dosen tetap Yayasan sebanyak **13.586** dosen.

Sebaran Wilayah PTS LLDIKTI 2025 dan 2024



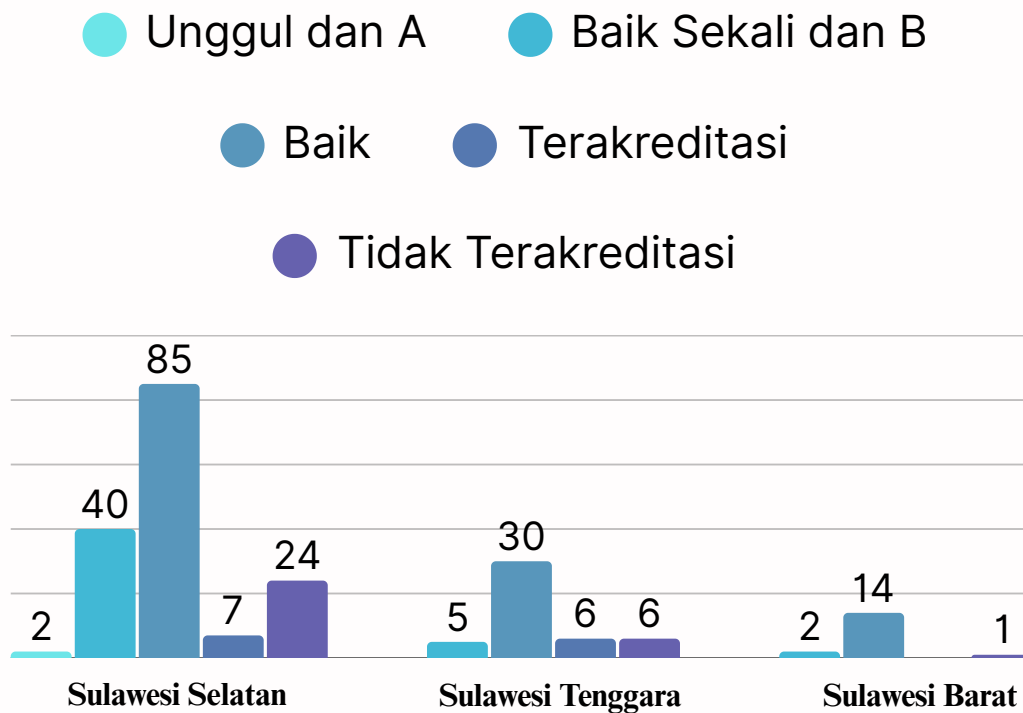
Gambar 11 Sebaran Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah IX

Bentuk PTS LLDIKTI Wilayah IX



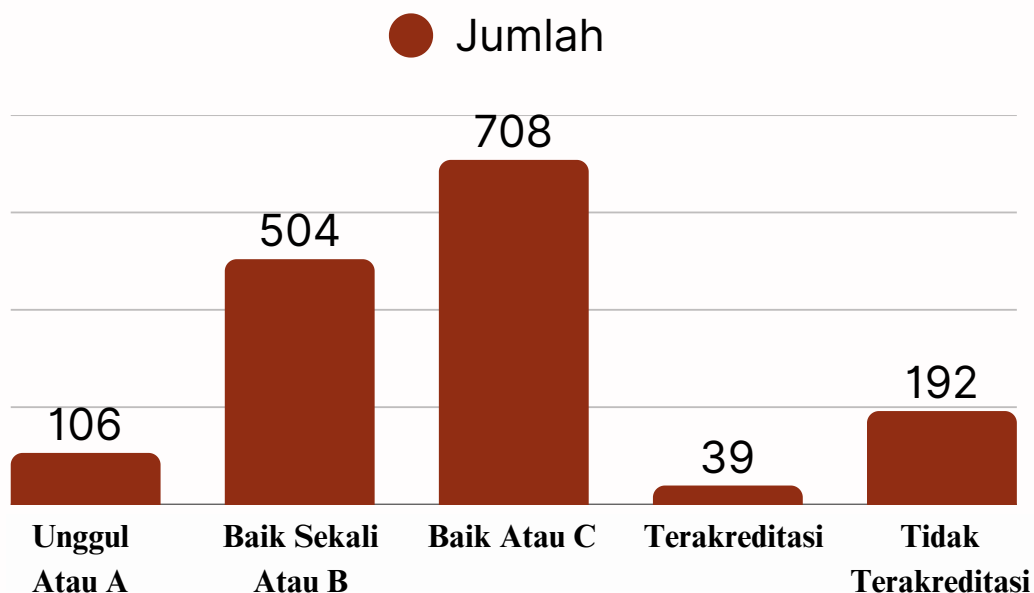
Gambar 12 Sebaran Bentuk PTS LLDIKTI Wilayah IX

Akreditasi PTS LLDIKTI Wilayah IX 2025



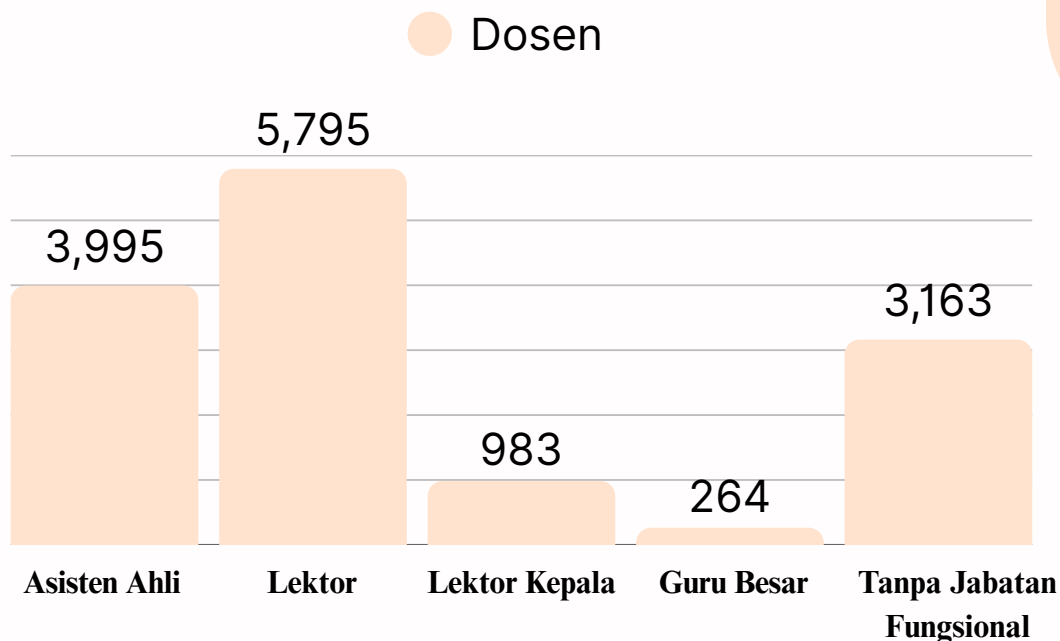
Gambar 13 Sebaran Akreditasi PTS LLDIKTI Wilayah IX

Akreditasi Prodi PTS LLDIKTI Wilayah IX 2025



Gambar 14 Sebaran Akreditasi Prodi PTS LLDIKTI Wilayah IX

Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional 2025



Gambar 15 Sebaran Jabatan Fungsional Dosen LLDIKTI Wilayah IX

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 LLDIKTI Wilayah IX :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana LLDIKTI mengatur bahwa pembinaan LLDIKTI;
- 7 Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 -2024;
- 8 Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI.

C. Tugas dan Fungsi Organisasi serta struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi :

- 1** Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- 2** Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi;
- 3** Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi, fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- 4** Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- 5** Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- 6** Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- 7** Pelaksanaan kerja sama;
- 8** Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- 9** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- 10** Pelaksanaan administrasi.



Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah IX dipimpin oleh seorang Kepala, dan didukung oleh Kepala Bagian Umum dan jabatan fungsional seperti yang tertera berikut:



Gambar 16 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah IX

LLDIKTI Wilayah IX memiliki 13 Tim Kerja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX No. 0331/LL9/HK.03.01/2025 untuk mewujudkan target kinerja IKU serta melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

SDM	Jumlah
Tenaga Kependidikan	73
PPPK	14
Tenaga PPNP	1
Dosen PNS	614
Dosen Yayasan	13.586

Tabel 1 Jumlah SDM LLDIKTI Wilayah IX

Demi mendukung tugas dan fungsinya terdapat beberapa tim yang terdiri dari :

1 Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

1. Melaksanakan penilaian usul pendirian, perubahan, dan pembubaran/pencabutan izin perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi;
2. Melaksanakan penyusunan usul penetapan pendirian, perubahan, dan pembubaran/pencabutan izin perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi.

2 Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang kelembagaan;
2. Melaksanakan pemetaan mutu kelembagaan;
3. Melaksanakan penilaian kinerja perguruan tinggi;
4. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan perguruan tinggi;
5. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan tata kelola perguruan tinggi;
6. Melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi dan program studi;
7. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3 Sistem Informasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. Melaksanakan pengelolaan pangkalan data Pendidikan tinggi;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi LLDIKTI.

4 Akademik

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang akademik
2. Melaksanakan pemetaan mutu akademik.

5 Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

1. Melaksanakan fasilitasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pemerolehan kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu pemerolehan kekayaan intelektual dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6 Kemahasiswaan

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang kemahasiswaan
2. Melaksanakan pemetaan mutu kemahasiswaan
3. Melaksanakan penilaian dan rekomendasi penerima beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan kesejahteraan mahasiswa;
4. Melaksanakan penelusuran lulusan perguruan tinggi dan sistem informasi dunia usaha dan dunia kerja;
5. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kemampuan akademik, wawasan, penalaran, kreativitas, minat, bakat, kewirausahaan, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan;

7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang sumber daya perguruan tinggi;
2. Melaksanakan pemetaan mutu sumber daya perguruan tinggi;
3. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Melaksanakan penilaian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi, dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional;
6. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen dan jabatan fungsional lainnya serta penetapan angka kredit jabatan akademik asisten ahli, lektor, dan lektor kepala;
7. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian beban kerja dosen;
8. Melaksanakan verifikasi data dan aktivitas dosen

8 Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

1. Melaksanakan penyusunan program kerja LLDIKTI;
2. Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan
3. Melaksanakan penyusunan laporan LLDIKTI.
4. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja LLDIKTI;
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan LLDIKTI;
6. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LLDIKTI;
7. Melaksanakan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LLDIKTI;
8. Melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran LLDIKTI;
9. Melaksanakan urusan pencairan anggaran LLDIKTI;
10. Melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, sertifikasi dosen, dan pembayaran lainnya di lingkungan LLDIKTI;

11. Melaksanakan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran LLDIKTI;
12. Melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran LLDIKTI;
13. Melaksanakan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia di lingkungan LLDIKTI;
14. Melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LLDIKTI;
15. Melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan / ganti rugi di lingkungan LLDIKTI;
16. Melaksanakan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan LLDIKTI;
17. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan LLDIKTI;

9 Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
2. Melaksanakan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LLDIKTI ;
3. Melaksanakan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan LLDIKTI;
4. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/ kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LLDIKTI;
5. Melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan LLDIKTI;
6. Melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/ kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan LLDIKTI;
7. Melaksanakan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai LLDIKTI;
8. Melaksanakan penyusunan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan LLDIKTI;
9. Melaksanakan penyusunan bahan pengangkatan dalam jabatan, pelantikan, dan serah terima jabatan di lingkungan LLDIKTI;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
11. Melaksanakan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Melaksanakan urusan cuti dan pemberian penghargaan/tanda jasa pendidik dan tenaga kependidikan;
13. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan tugas belajar, penilaian pemberian beasiswa, pemberhentian sementara dari jabatan dosen, dan pengaktifan Kembali dosen perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
14. Melaksanakan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja LLDIKTI;
15. Melaksanakan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan publik LLDIKTI.

10 Hukum dan Tatakelola

1. Melaksanakan penyusunan rancangan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama di lingkungan LLDIKTI;
2. Melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
3. Melaksanakan penyusunan bahan advokasi hukum di lingkungan LLDIKTI;

11 Barang Milik Negara dan Sarpras Perguruan Tinggi

1. Melaksanakan urusan barang milik negara;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan LLDIKTI;
3. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan LLDIKTI;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi;
5. Melaksanakan penyusunan usul penerima bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi.

12 Persuratan, Kearsipan dan Kerumahtanggaan

1. Melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan LLDIKTI;
2. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LLDIKTI; dan
3. Melaksanakan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan LLDIKTI;
4. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan di lingkungan LLDIKTI;
5. Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan LLDIKTI;
6. Melaksanakan urusan layanan kesehatan dan layanan kepastakaan di lingkungan LLDIKTI;
7. Melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan LLDIKTI;
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis LLDIKTI.

13 Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

1. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, industri, dan instansi lain;
2. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan rekomendasi kerja sama luar negeri perguruan tinggi;
3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang kerja sama perguruan tinggi;
4. Melaksanakan penyusunan bahan kerja sama;

5. Melaksanakan kerja sama di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi;
6. Melaksanakan urusan publikasi, hubungan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan LLDIKTI;
7. Melaksanakan penyusunan bahan jawaban atas pemberitaan media massa dan pengaduan masyarakat.

D. Isu - Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Isu strategis pada satuan kerja LLDIKTI Wilayah IX pada tahun 2025 masih terkait dengan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Renstra tahun 2020-2024, diantaranya :

A Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan PTS
 - a. Masih banyak dosen yang berstatus Tenaga Pengajar;
 - b. Kurangnya PTS dalam mengalokasikan dana penelitian;
 - c. Kemampuan dosen terhadap Teknologi Informasi masih kurang, terutama dosen yang telah berusia lanjut;
 - d. Masih terdapat Pimpinan PTS yang kurang memberikan motivasi dalam peningkatan jabatan akademik dosen;
 - e. Banyak dosen yang tidak memahami prosedur pengajuan proposal penelitian hibah Ristek/BRIN;
 - f. Terkait pelaporan PDDIKTI, kualitas SDM operator PTS kurang memadai dalam hal kemampuan IT/laboran/pustakawan, dll;
 - g. Masih kurangnya kesadaran Dosen untuk update data.
2. Mahasiswa/profil lulusan
 - a. Kualitas lulusan belum sesuai dengan standar kompetensi lulusan (KKNI);
 - b. Tidak semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi sebagai surat keterangan pendamping ijazah;
 - c. Proses perkuliahan dan ujian belum sepenuhnya memenuhi standar.

B Kualitas PTS

1. Akreditasi PT dan PS (masih banyak PT/PS belum terakreditasi), belum munculnya budaya mutu secara internal.
2. Pelaporan PDDIKTI, masih banyak PT yang pelaporannya tidak 100%.
3. Tidak terpenuhinya standard minimal sarana dan prasarana PTS.

C Internal LLDIKTI Wilayah IX

1. Sumber daya pendukung pelayanan, masalah ini muncul akibat dari kekurangan sumber daya manusia pendukung pelayanan sehingga untuk mengoptimalkan layanan perlu didukung teknologi informasi yang memadai agar pelayanan berjalan secara optimal. Sampai pada tahun 2025 ini, LLDIKTI Wilayah IX telah memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepada stakeholder;
2. Struktur sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul akibat berakhirnya masa bakti sumber daya manusia tersebut serta belum terdapatnya formasi untuk menggantikan sumber daya manusia yang telah memasuki masa purnabakti;
3. Sumber daya anggaran, masalah ini muncul pada kegiatan- kegiatan penunjang capaian indikator kinerja yang belum terdapat alokasi dari Direktorat Jenderal yang membina indikator kinerja tersebut;
4. Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal;
5. Sistem pengukuran kinerja belum menampilkan data yang benar-benar akurat, karena belum adanya sistem yang terintegrasi antara LLDIKTI dan PTS untuk menyampaikan capaian kinerjanya secara berkesinambungan;
6. LLDIKTI Wilayah IX masih terus berupaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara tepat, cepat, terbuka, bebas pungutan liar (pungli), sederhana, mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif;
7. Implementasi manajemen risiko pada Lembaga Layanan Pendidikan tinggi Wilayah IX masih menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman SDM terhadap konsep manajemen risiko dimana pemetaan risiko yang masih kurang tajam karena masih berkutat pada hal-hal yang bersifat operasional.

2. Peran Strategis Organisasi

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon II, LLDIKTI Wilayah IX mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam Tata Kelola Kelembagaan. Peran strategis LLDIKTI Wilayah IX ialah :



Berperan penting dalam layanan fasilitasi peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;



Berperan sebagai pengawal dan pelaksana kebijakan kementerian kepada perguruan tinggi di wilayahnya;



Berperan sebagai pengawal dan pelaksana kebijakan kementerian kepada perguruan tinggi di wilayahnya;



BAB 2

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

Visi LLDIKTI Wilayah IX

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon II dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX dalam menentukan visinya berdasarkan pada Visi Kemdiktisaintek 2025-2029, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2024-2029, serta Visi Indonesia Emas 2045.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mendukung Visi dan Misi Kemdiktisaintek untuk Terwujudnya Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Visi LLDIKTI Wilayah IX

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemdiktisaintek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu menjabarkan misi

1

Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing sebagai upaya untuk mendukung transformasi ekonomi.

2

Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

3

Mewujudkan tata kelola Pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berintegritas untuk membantu mewujudkan transformasi tata Kelola.

Untuk itu, misi LLDIKTI Wilayah IX dalam mencapai visinya adalah :

- 1 Melakukan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- 2 Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- 3 Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- 4 Melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- 5 Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- 6 Melaksanakan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- 7 Melaksanakan kerja sama;
- 8 Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- 9 Melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang mutu Pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat; dan
- 10 Melaksanakan administrasi LLDIKTI secara akuntabel.

Tata Nilai LLDIKTI Wilayah IX

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemdiktisaintek dalam menjalankan tugas membangun Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1 Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemdiktisaintek diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan.

2 Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat.

3 Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemdiktisaintek sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah.

4 Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemdiktisaintek harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian.

5 Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemdiktisaintek perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6 Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemdiktisaintek semestinya suka berusaha mencapai tujuan Bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7 Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemdiktisaintek, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemdiktisaintek memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama.

Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah IX

Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah IX mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang terkait dengan Pendidikan tinggi, yakni:

1 Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu;

2 Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan;

B. Rencana Kerja Jangka Menengah

Sebagai pengguna anggaran, LLDIKTI Wilayah IX menyusun rencana kerja tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 403.273.209.000

Rencana kerja LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025-2029 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kepmendikbudrisrek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama. Berikut rencana kerja tahun 2025-2029:

No	Sasaran Kegiatan	IKU/IKK	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93	94	95	95	96
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	87	88	88	89	90
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	44	45	45	46	47
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	10	11	13	15	18
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	79	80	81	83	85

No	Sasaran Kegiatan	IKU/IKK	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	48	49	50	53	56
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	67	68	70	73	75
4	[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA
		IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7

Tabel 2 Rencana Kerja Tahun 2025-2029

C. Tujuan Strategis

1. Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah IX

Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah IX mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang terkait dengan Pendidikan tinggi, yakni:

- 1 Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu;
- 2 Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan;
- 3 Penguatan karakter peserta didik (mahasiswa);
- 4 Peningkatan produktifitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
- 5 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2. Sasaran Strategis LLDIKTI Wilayah IX

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2025. Adapun sasaran kegiatan LLDIKTI Wilayah IX antara lain :

- 1 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
- 2 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi;
- 3 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- 4 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI;

3. Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah IX

Arah kebijakan LLDIKTI Wilayah IX dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya:

- 1 Meningkatkan kualitas wawasan dan pemahaman penyelenggara Pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah;
- 2 Meningkatkan ketaat-asasan penyelenggara pendidikan tinggi di PT dalam rangka meminimumkan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap regulasi;

- 3 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh elemen penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Strategi kebijakan LLDIKTI Wilayah IX dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya:

- 1 Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
- 2 Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi sehat agar tercipta atmosfer akademik yang kondusif;
- 3 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Perguruan Tinggi;
- 4 Peningkatan jumlah penelitian, publikasi nasional dan internasional bagi tenaga edukatif;
- 5 Peningkatan kerja sama antar Perguruan Tinggi, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
- 6 Peningkatan inovasi dan kreatifitas mahasiswa menuju kemandirian; dan
- 7 Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX.

D. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

1. Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2025
1	[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	87

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2025
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	44
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	10
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	79
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	48
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	67
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA
		IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99.3

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

2. Perjanjian Kinerja Akhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2025
1	[S1] Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	87
2	[S 2] Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	44
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	10
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	79
3	[S 3] Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	48
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	67
4	[SK 4] Meningkatkan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA
		IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99.3

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025

3. Alokasi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 196.874.832.000
2	7734	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp 125.771.062.000
Total			Rp 322.645.894.000

Tabel 5 Pagu Anggaran Awal LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 209.665.113.000
2	7734	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp 193.608.096.000
Total			Rp 403.273.209.000

Tabel 6 Pagu Anggaran Akhir LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025



E. Program Prioritas

Program prioritas LLDIKTI Wilayah IX berfokus pada "Kampus Berdampak" melalui penguatan IKU (Indikator Kinerja Utama), akselerasi jabatan fungsional dosen, hilirisasi riset, serta kemandirian bangsa (pangan, energi, teknologi).

Program prioritas LLDIKTI Wilayah IX sebagai berikut :

- 1 Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Tinggi;
- 2 Akselerasi Karier Dosen;
- 3 Hilirisasi Riset dan Pengabdian Masyarakat
- 4 Transformasi dan Kampus Berdampak;
- 5 Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).



BAB 3

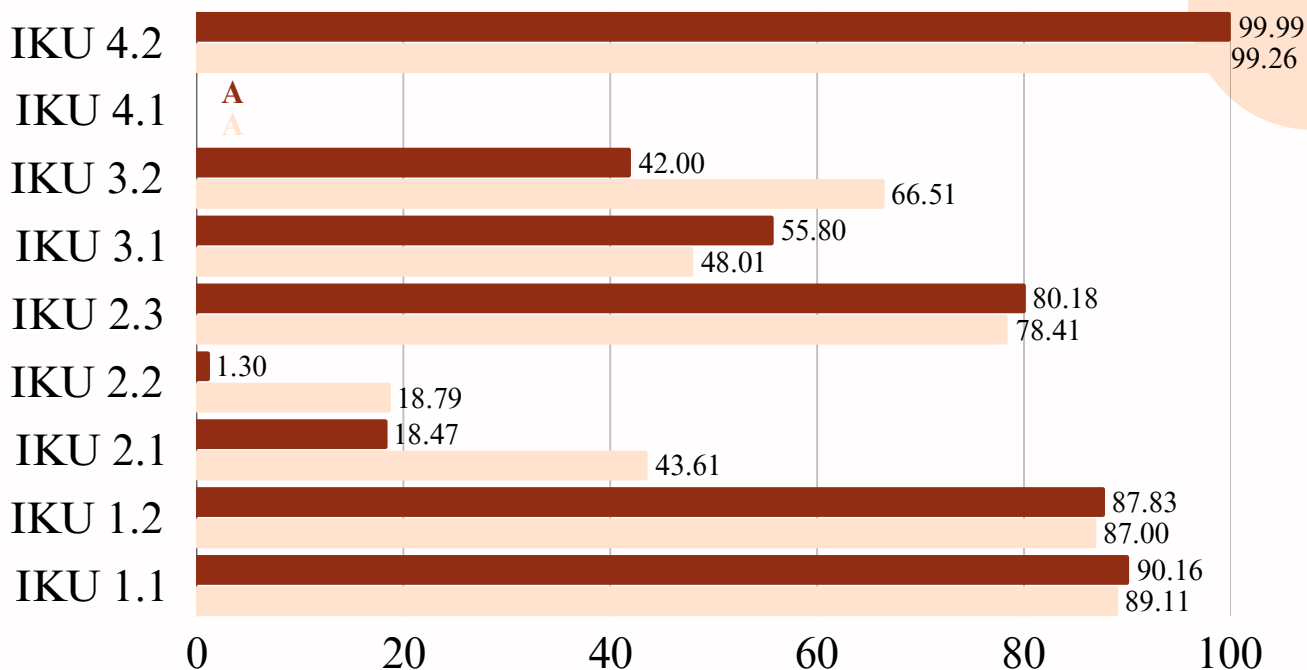
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, LLDIKTI Wilayah IX menetapkan 4 Sasaran. Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan beserta target yang akan dicapai. Berikut ini adalah perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 2024.



● 2025 ● 2024



Gambar 17 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Ketercapaian Sasaran Kegiatan 1 ini ditandai dengan dua indikator kinerja kegiatan yang memiliki sasaran kegiatan meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dari segi keunggulan layanan dan Arsitektur Peguruan Tinggi Swasta (PTS) yaitu IKK 1.1 kepuasan pengguna terhadap layanan utama LDIKTI dan IKK 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.

IKK 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Layanan utama LLDIKTI diukur dalam beberapa kategori layanan, antara lain layanan akademi, layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan serta layanan terkait dengan administrasi. Dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

dimana :

n : responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrument survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

t : total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI persentase responden yang dikumpulkan)

Adapun capaian IKK 1.1 pada tahun 2024 diperoleh nilai realisasi sebesar 90,16% yang tidak mencapai target 2025 sebesar 93%, sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	93	90.16	96.94	96
2024	93	89.11	95.81	

Tabel 7 Perbandingan Capaian IKK 1.1

Program Kegiatan

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja IKK 1.1 adalah sebagai berikut :

- 1 Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan Publik;
- 2 Evaluasi SOP;
- 3 Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Layanan SPBE;
- 4 Verifikasi dan Validasi Pelaporan PDDIKTI;
- 5 Bimtek Penulisan Artikel Ilmiah
- 6 Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Pimpinan PTS LLDIKTI Wilayah IX;
- 7 Anugerah PTS LLDIKTI Wilayah IX.



Gambar 18 Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pimpinan PTS



Gambar 19 Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) SPBE



Gambar 20 Verval Laporan PDDIKTI



Gambar 21 Evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP)

Kendala / Permasalahan

Untuk nilai capaian IKK 1.1 tidak mencapai target sebagaimana pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 disebabkan disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya ialah :

- 1 Penilaian kualitas layanan terbatas pada layanan SIPINTER;
- 2 Terjadi penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan beberapa responden yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap layanan LLDIKTI Wilayah IX. Hal ini disebabkan karena beberapa pertanyaan dalam survei menimbulkan persepsi yang berbeda dari pertanyaan yang diajukan dalam pengisian survei. Sehingga kedepannya, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu disesuaikan sehingga diperoleh jawaban dari pengguna layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Strategi / Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi kendala/permasalahan dalam capaian IKK 1.1, strategi yang akan dilakukan ialah :

- 1 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik ke seluruh pegawai LLDIKTI IX;
- 2 Sosialisasi sistem reward and punishment untuk pegawai LLDIKTI IX;
- 3 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada stakeholder yang lebih masif;
- 4 Pembentukan pedoman internal untuk survei kepuasan layanan;
- 5 Pembentukan tim khusus/kerjasama dengan akademi/praktisi untuk pelaksanaan survei kepuasan layanan yang mencakup seluruh aplikasi layanan;
- 6 Pelatihan pelayanan prima berkala;
- 7 Sosialisasi Anti Korupsi berkala.

IKK 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Indikator Sasaran Kinerja 1 yang kedua yaitu IKK 1.2 diukur dari presentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain. Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{a+b}{t} \times 100$$

dimana :

- a : jumlah PTS yang terakreditasi.
b : jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan.
t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Dari nilai di atas di dapatkan realisasi yang melebihi target, dimana target untuk capaian kinerja IKK 1.2 adalah 87% dan didapatkan nilai 87.83% untuk tahun 2025 dan lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sesuai dengan tabel di bawah ini :

$$\frac{191+4}{222} \times 100 = 87.83\%$$

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	87	87.83	100.01	90
2024	68	87	127.94	

Tabel 8 Perbandingan Capaian IKK 1.2

Berikut rincian perguruan tinggi yang sudah terakreditasi beserta akreditasi dalam lingkup LLDIKTI Wilayah IX :

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
1	91088	Universitas Wira Bhakti	Baik
2	91083	Universitas Wallacea	Baik
3	91046	Universitas Tomakaka	Baik
4	91040	Universitas Teknologi Sulawesi	Baik
5	91074	Universitas Teknologi Akba Makassar	Baik Sekali
6	91090	Universitas Tamalatea Makassar	Baik
7	91078	Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa	Baik
8	91079	Universitas Sulbar Manarang	Baik
9	91015	Universitas Sulawesi Tenggara	Baik
10	91080	Universitas Sibatokkong Mambo	Baik
11	91013	Universitas Sawerigading Makassar	Terakreditasi
12	91076	Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
13	91057	Universitas Puangrimaggalatung	Baik Sekali
14	91008	Universitas Pepabri Makassar	Baik
15	91048	Universitas Pejuang Republik Indonesia	Baik
16	91047	Universitas Patria Artha	Baik
17	91075	Universitas Patompo	Baik
18	91017	Universitas Pancasakti	Baik
19	91050	Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara	Baik
20	91053	Universitas Muslim Maros	Baik Sekali
21	91002	Universitas Muslim Indonesia	Unggul
22	91062	Universitas Muslim Buton	Baik
23	91064	Universitas Muhammadiyah Sinjai	Baik Sekali
24	91058	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang	Baik Sekali
25	91024	Universitas Muhammadiyah Pare-pare	Baik Sekali
26	91059	Universitas Muhammadiyah Palopo	Baik Sekali
27	91071	Universitas Muhammadiyah Mamuju	Baik Sekali
28	91004	Universitas Muhammadiyah Makassar	Unggul
29	91036	Universitas Muhammadiyah Kendari	Baik Sekali
30	91065	Universitas Muhammadiyah Enrekang	Baik Sekali
31	91032	Universitas Muhammadiyah Buton	Baik Sekali
32	91061	Universitas Muhammadiyah Bulukumba	Baik
33	91069	Universitas Muhammadiyah Bone	Baik Sekali

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
34	91086	Universitas Muhammadiyah Barru	B
35	91056	Universitas Megarezky	Baik Sekali
36	91067	Universitas Mega Buana Palopo	Baik Sekali
37	91068	Universitas Mandala Waluya	Baik Sekali
38	91072	Universitas Lamappapoleonro	B
39	91021	Universitas Lakidende Unahaa	Baik
40	91093	Universitas Kurnia Jaya Persada	Terakreditasi
41	91020	Universitas Kristen Indonesia Toraja	Baik
42	91003	Universitas Kristen Indonesia Paulus	B
43	91081	Universitas Karya Persada Muna	Baik
44	91028	Universitas Islam Makassar	Baik Sekali
45	91034	Universitas Indonesia Timur	Baik Sekali
46	91073	Universitas Ichsan Sidenreng Rappang	Baik
47	91077	Universitas Handayani Makassar	Baik
48	91091	Universitas Famika	Baik
49	91045	Universitas Fajar	B
50	91070	Universitas Dipa Makassar	B
51	91006	Universitas Dayanu Ikhsanuddin	Baik Sekali
52	91039	Universitas Cokroaminoto Palopo	Baik Sekali
53	91019	Universitas Cokroaminoto Makassar	Baik Sekali
54	91084	Universitas Cahaya Prima	Baik Sekali

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
55	91049	Universitas Bosowa	Terakreditasi
56	91009	Universitas Atma Jaya Makassar	Baik
57	91082	Universitas Andi Sudirman	Baik Sekali
58	91023	Universitas Andi Djemma Palopo	Baik Sekali
59	91085	Universitas Almarisah Madani	Baik Sekali
60	91037	Universitas Al Asyariah Mandar	Baik Sekali
61	93177	STMIK Profesional Makassar	Baik
62	93093	STMIK Kharisma Makassar	Baik
63	93125	STMIK Catur Sakti Kendari	Baik
64	93009	STKIP YPUP Makassar	Baik
65	93018	STKIP Veteran Sidrap	Baik
66	93201	STKIP Tomakaka Tiwikrama	Baik
67	93194	STKIP Pelita Nusantara Buton	Baik
68	93154	STKIP Darud Da wah Wal Irsyad Pinrang	Baik
69	93023	STITEK Dharma Yadi Makassar	Baik
70	93017	STISIP Veteran Palopo	Baik
71	93058	STISIP Petta Baringeng Soppeng	Baik
72	93168	STISIP Bina Generasi Polewali	Baik
73	93122	STIMIK Bina Bangsa	Baik
74	93045	STIM LPI Makassar	Baik
75	93114	STIM Lasharan Jaya Makassar	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
76	93044	STIKS Tamalanrea Makassar	Baik
77	93148	STIKES Tanawali Takalar	Baik
78	93207	STIKES Pelita Ibu	Baik
79	93152	STIKES Panakkukang	Baik
80	93161	STIKES Marendeng Majene	Baik
81	93155	STIKES Lakipadada	Baik
82	93176	STIKES IST Buton	Terakreditasi
83	93126	STIKES Gema Insan Akademik	Baik
84	93150	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar	Baik
85	93178	STIKES Bataraguru Soroaka	Baik
86	93171	STIKES Amanah Makassar	Baik
87	93142	Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia	Baik
88	93101	Sekolah Tinggi Teknik Baramuli	Baik
89	93215	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amika Soppeng	Baik
90	93213	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Harapan Celebes	Baik
91	93097	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Andi Matappa	Baik
92	93109	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone	Baik
93	93049	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha	Baik
94	93063	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari	Baik
95	93217	Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Mega Buana	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
96	93046	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI	Baik Sekali
97	93205	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari	Baik
98	93157	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makasar	Baik
99	93196	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros	Baik Sekali
100	93172	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada Bulukumba	Baik
101	93218	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada Bulukumba	Terakreditasi
102	93080	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar	Baik Sekali
103	93181	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan	Baik
104	93208	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari	Baik
105	93216	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare	Baik
106	93200	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre	Baik
107	93192	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Mulia	Baik
108	93140	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene	Baik
109	93141	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli	Baik
110	93019	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar	Terakreditasi
111	93050	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapman Majene	Baik
112	93108	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapi Bone	Baik
113	93082	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara	Terakreditasi
114	93167	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana	Baik
115	93053	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar	Baik
116	93081	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
117	93027	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya	Baik Sekali
118	93048	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar	Baik
119	93016	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar	Baik
120	93060	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari	Baik Sekali
121	93210	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Insan Madani Mandar	Baik
122	93211	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar	Baik Sekali
123	93064	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar	Baik Sekali
124	93020	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar	Baik
125	93139	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris	Baik
126	93074	Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur	Baik
127	93015	Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar	Baik
128	95021	Politeknik Tridaya Virtu Morosi	Baik
129	95017	Politeknik Teknokrat Internasional Kolaka	Baik
130	95026	Politeknik Sorowako	Baik
131	95012	Politeknik Sandi Karsa	Baik
132	95024	Politeknik Paramata Raha	Baik
133	95025	Politeknik Palopo	Baik
134	95013	Politeknik Nusantara Makassar	Baik
135	95022	Politeknik Muhammadiyah Makassar	Baik Sekali
136	95008	Politeknik Maritim AMI Makassar	Baik Sekali
137	95016	Politeknik Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
138	95019	Politeknik Kesehatan Megarezky	Baik
139	95006	Politeknik Indotec Kendari	Baik
140	95014	Politeknik Indonesia	Baik
141	95018	Politeknik Bombana	Baik
142	95009	Politeknik Baubau	Terakreditasi
143	92024	Institut Sains Teknologi dan Kesehatan 'Aisyiyah Kendari	Baik
144	92020	Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada	Baik Sekali
145	92035	Institut Turatea Indonesia	Baik Sekali
146	92041	Institut Toraja Raya Indonesia	Baik Sekali
147	92030	Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar	Baik
148	92009	Institut Teknologi Pertanian	Baik
149	92028	Institut Teknologi Pendidikan dan Bisnis Qana'ah Sidenreng Rappang	Baik
150	92017	Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap	Baik Sekali
151	92023	Institut Teknologi Kelautan Buton	Baik
152	92010	Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional	Baik
153	92011	Institut Teknologi dan Kesehatan Permata Ilmu Maros	Baik
154	92004	Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna	Terakreditasi
155	92021	Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia	Baik Sekali
156	92013	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
157	92007	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar	Baik
158	92026	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Kolaka	Baik
159	92019	Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Baik Sekali
160	92006	Institut Teknologi dan Bisnis Kalla	Baik
161	92036	Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata	Baik
162	92032	Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat	Baik
163	92042	Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru	Baik
164	92039	Institut Mekongga	Baik
165	92022	Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya	Terakreditasi
166	92038	Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka	Baik
167	92008	Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju	Baik
168	92012	Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin	B
169	92034	Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng	Baik
170	92040	Institut Dharma Bharata Grup	Baik
171	92037	Institut Cokroaminoto Pinrang	Baik
172	92005	Institut Bisnis dan Keuangan Nitro	B
173	92043	Institut Batari Toja Bone	Terakreditasi
174	94047	AMIK Tomakaka	Baik
175	94025	AMIK Ibnu Khaldun Palopo	Baik

No	Kode PT	Nama PT	Akreditasi PT
176	94098	AKPER Putra Pertiwi Watansoppeng	Baik
177	94002	Akademi Maritim Indonesia AIPI	Baik
178	94156	Akademi Manajemen Bisnis Kendari	Terakreditasi Sementara
179	94152	Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja	Baik
180	94153	Akademi Kesehatan Konawe	Baik
181	94068	Akademi Keperawatan Yapi	Baik
182	94050	Akademi Keperawatan Yapenas 21 Maros	Baik
183	94126	Akademi Kebidanan Menara Primadani	Baik
184	94154	Akademi Kebidanan Mega Buana	Baik
185	94084	Akademi Kebidanan Konawe	Baik
186	94134	Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep	Baik
187	94005	Akademi Ilmu Gizi YPAG Makassar	Baik
188	94142	Akademi Farmasi Yamasi Makassar	Baik
189	94146	Akademi Farmasi Toraja	Baik
190	94155	Akademi Bisnis 11 Oktober Kendari	Terakreditasi Sementara
191	94001	Akademi Bahasa Asing UMI Makassar	Baik

Tabel 9 Daftar PTS yang Terakreditasi dan Akreditasinya

Pada tahun 2025, terdapat beberapa perguruan tinggi yang telah melakukan konsolidasi ataupun penggabungan, berikut PTS yang telah melakukan penggabungan :

Nzma PTS	Tahun
Universitas Kurnia Jaya Persada	2025
Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara	2025
Universitas Graha Edukasi	2025
Institut Hasan Sulur	2025

Tabel 10 Daftar PTS yang Melakukan Konsolidasi/Merger 2025

Program Kegiatan

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja IKK 1.2 adalah sebagai berikut :

- 1

Penggabungan/Penyatuan PT;
- 2

Workshop Akreditasi Instrument 4.0 dan Sapto 2.0;
- 3

Pendampingan Akreditasi Mandiri.
- 4

Bimtek Tata Kelola Badan Penyelenggara PTS



Gambar 22 Bimbingan Teknis Tata Kelola Badan Penyelenggara PTS)



Gambar 23 Pendampingan Akreditasi Instrumen 4.0 dan SAPTO 2.0)

Kendala / Permasalahan

Kendala-kendala dalam meningkatkan persentase IKK 1.2

- 1 Migrasi data pada PDDIKTI belum selesai;
- 2 PT belum memahami pengajuan Akreditasi pasca penggabungan;
- 3 PT masih harus menyesuaikan dengan aplikasi baru;
- 4 Data Dosen pada prodi di PT tidak mencukupi;
- 5 PT masih kesulitan dalam membuat laporan Evaluasi diri.

Strategi / Tindak Lanjut

Langkah strategi/tindak lanjut untuk IKK 1.2 adalah :

- 1 Pendampingan migrasi data bagi PT penggabungan/penyatuan;
- 2 Workshop/Bimtek Akreditasi khusus bagi PT penggabungan/penyatuan;
- 3 Bimtek mandiri bagi PT yang belum memahami aplikasi baru;
- 4 Mendorong perekrutan dosen baru bagi prodi yang dosennya tidak mencukupi;
- 5 Bimtek mandiri dalam penyusunan Instrument Akreditasi.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

Ketercapaian Sasaran Kegiatan 2 ini diukur oleh meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi dengan 3 indikator kinerja yaitu IKK 2.1 persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi, IKK 2.2 persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi, IKK 2.3 persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.

IKK 2.1 persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi ini merupakan bentuk komitmen Perguruan tinggi dalam memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studinya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna atau mampu mandiri berwirausaha melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kriteria Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi ini adalah Mahasiswa S1 / D4 / D3 / D2 / D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.

Formula perhitungan pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

dimana :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n : jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.

t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

$$\frac{41}{222} \times 100 = 18.47\%$$

Jumlah perguruan tinggi yang telah melaksanakan MBKM per 31 Desember 2025 sebanyak 41 PTS (18.47%), dimana target mahasiswa yang mengikuti MBKM tahun 2025 sebanyak 23.000 mahasiswa. Pada tahun 2025 ini jumlah PTS yang mengikuti MBKM mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 99 PTS (43,61%). Penurunan tersebut disebabkan terjadinya Perubahan Kebijakan Kementerian yang merubah Program MBKM menjadi Program Kampus Berdampak.

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	44	18.47	41.97	47
2024	34	43.61	128.26	

Tabel 11 Perbandingan Capaian IKK 2.1

Program Kegiatan

- 1 Terdapat perubahan kebijakan MBKM baik dari nomenklatur maupun beberapa program menyesuaikan dengan kebijakan program saat ini yaitu Diktisaintek Berdampak sehingga program kegiatan untuk menunjang IKU 2.1 belum ada.

Kendala / Permasalahan

Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

- 1 Kebijakan MBKM diawal tahun 2025 diganti dengan Kampus berdampak, sehingga sebahagian perguruan tinggi tidak lagi melanjutkan program MBKM di kampus.

Strategi / Tindak Lanjut

Di tahun 2026 berdasarkan rancangan IKU 5, terdapat kebijakan yang mengharuskan perguruan tinggi untuk tetap bisa melanjutkan kegiatan MBKM. adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja IKU 2.1 adalah:

- 1 Melakukan sosialisasi mengenai kampus berdampak dan program yang dapat dilakukan guna mendukung program kampus berdampak yang merupakan kelanjutan dari program MBKM.

IKK 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Indikator ini mempunyai dua kriteria, dihitung dari jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 PT yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus ditambahkan dengan PTS yang memiliki mahasiswa berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi : a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Adapun formula indikator kinerja IKK 2.2 ialah :

$$\frac{nk}{t} \times 100$$

dimana :

n : jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.

k : pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.

t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Matriks bobot sks :

Jumlah SKS	Bobot
$x \geq 20$	1.00
$10 \leq x < 20$	0.5

Matriks bobot prestasi :

Tingkat Wilayah Kompetensi	Bobot
Internasional	0.75
Nasional	0.50
Provinsi	0.20

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	10	1.30	13	18
2024	10	18.49	187.9	

Tabel 12 Perbandingan Capaian IKK 2.2

Pada kriteria IKU 2.2 (a) didapatkan persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan persentase 18,47%. Data mahasiswa yang meraih prestasi sesuai dengan kriteria IKU 2.2 (b) adalah sebanyak 1.243 mahasiswa telah melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target dari DIPA. Mahasiswa berprestasi sebanyak 1.243 mahasiswa dengan persentase 0,4% dari total keseluruhan jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2025 sebanyak 314.296 mahasiswa.

Program Kegiatan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja atas Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi, antara lain:

- 1 Workshop dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan ORMAWA;
- 2 Pembinaan program kreativitas mahasiswa (PKM);
- 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi.



Gambar 24 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Kendala / Permasalahan

Kendala/permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target IKU 2.2 ini adalah :

- 1 Kebijakan MBKM diawal tahun 2025 diganti dengan Kampus berdampak, sehingga sebahagian perguruan tinggi tidak lagi melanjutkan program MBKM di kampus;
- 2 Penambahan jumlah persentase data mahasiswa berprestasi belum terjadi kenaikan disebabkan data mahasiswa berprestasi belum diberikan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek

Strategi / Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja IKU 2.2 antara lain :

- 1 Fasilitasi perguruan tinggi melalui kegiatan workshop untuk meningkatkan prestasi mahasiswa
- 2 Membuat Permohonan data mahasiswa berprestasi pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek;
- 3 Sebelum melaksanakan kegiatan, TIM Kemahasiswaan melakukan koordinasi 1 minggu sebelum jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

IKK 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Pada IKK 2.3 mengukur jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI IX yang telah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi. Namun pada IKK ini hanya di batas pengukuran PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan PPKS dalam membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Adanya pembentukan satgas PPKS merupakan langkah krusial untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada IKU 2.3 didapatkan nilai capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

dimana :

n : jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.
t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

$$\frac{178}{222} \times 100 = 80.18\%$$

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai capaian IKK 2.3 tahun 2025 sebesar 80.18% yang melewati target capaian sebesar 79%. Capaian tersebut meningkat sebanyak 1.77% dari capaian tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	79	80.18	101.49	85
2024	50	78.41	156.82	

Tabel 13 Perbandingan Capaian IKK 2.3

No	Nama PT
1	Universitas Muslim Indonesia
2	Universitas Kristen Indonesia Paulus
3	Universitas Muhammadiyah Makassar
4	Universitas Dayanu Ikhsanuddin
5	Universitas Pepabri Makassar
6	Universitas Sulawesi Tenggara
7	Universitas Cokroaminoto Makassar
8	Universitas Kristen Indonesia Toraja
9	Universitas Lakidende Unaaha
10	Universitas Andi Djemma Palopo
11	Universitas Muhammadiyah Pare-pare
12	Universitas Islam Makassar
13	Universitas Muhammadiyah Buton
14	Universitas Indonesia Timur
15	Universitas Muhammadiyah Kendari
16	Universitas Al Asyariah Mandar
17	Universitas Cokroaminoto Palopo
18	Universitas Teknologi Sulawesi
19	Universitas Fajar

No	Nama PT
20	Universitas Tomakaka
21	Universitas Patria Artha
22	Universitas Pejuang Republik Indonesia
23	Universitas Bosowa
24	Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
25	Universitas Muslim Maros
26	Universitas Megarezky
27	Universitas Puangrimaggalatung
28	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
29	Universitas Muhammadiyah Palopo
30	Universitas Muhammadiyah Bulukumba
31	Universitas Muhammadiyah Sinjai
32	Universitas Muhammadiyah Enrekang
33	Universitas Mega Buana Palopo
34	Universitas Mandala Waluya
35	Universitas Muhammadiyah Bone
36	Universitas Dipa Makassar
37	Universitas Muhammadiyah Mamuju
38	Universitas Lamappapoleonro
39	Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
40	Universitas Teknologi Akba Makassar
41	Universitas Patompo
42	Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

No	Nama PT
43	Universitas Handayani Makassar
44	Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa
45	Universitas Sulbar Manarang
46	Universitas Sipatokkong Mambo
47	Universitas Karya Persada Muna
48	Universitas Andi Sudirman
49	Universitas Cahaya Prima
50	Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna
51	Institut Bisnis dan Keuangan Nitro
52	Institut Teknologi dan Bisnis Kalla
53	Institut Teknologi dan Bisnis MUhammadiyah Polewali Mandar
54	INSTITUT TEKNOLOGI PERTANIAN
55	Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional
56	Institut Teknologi dan Kesehatan Permata Ilmu Maros
57	Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin
58	Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap
59	Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
60	Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
61	Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
62	Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
63	Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya
64	Institut Teknologi Kelautan Buton
65	Institut Sains Teknologi dan Kesehatan 'Aisiyyah Kendari

No	Nama PT
66	Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara
67	Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar
68	Institut Teknologi dan Bisnis Arungpalakka
69	Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
70	Institut Turatea Indonesia
71	Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata
72	Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka
73	Institut Mekongga
74	Institut Dharma Bharata Grup
75	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al Gazali Barru
76	STKIP Muhammadiyah Barru
77	Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar
78	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar
79	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassa
80	STITEK Dharma Yadi Makassar
81	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
82	STIKS Tamalanrea Makassar
83	STIM LPI Makassar
84	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI
85	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar
86	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha
87	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapman Majene
88	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

No	Nama PT
89	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari
90	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar
91	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar
92	Sekolah Tinggi Theologia Intim Makassar
93	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar
94	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju
95	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
96	STMIK Kharisma Makassar
97	STKIP Andi Mattappa
98	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti
99	Sekolah Tinggi Teknik Baramuli
100	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapi Bone
101	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone
102	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Famika
103	STIM Lasharan Jaya Makassar
104	STMIK Catur Sakti Kendari
105	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika
106	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin
107	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene
108	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli
109	Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia
110	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar
111	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja

No	Nama PT
112	STIKES Tanawali Takalar
113	STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya
114	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar
115	STIKES Panakkukang
116	STKIP Darud Da wah Wal Irsyad Pinrang
117	STIKES Lakipadada
118	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makasar
119	STIKES Marendeng Majene
120	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana
121	STIKES Amanah Makassar
122	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada
123	STMIK Profesional Makassar
124	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan
125	STKIP Pelita Nusantara Buton
126	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros
127	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre
128	STKIP Tomakaka Tiwikrama
129	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari
130	STIKES Pelita Ibu
131	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari
132	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar
133	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amika Soppeng
134	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare

No	Nama PT
135	Akademi Ilmu Gizi YPAG Makassar
136	Akademi Teknik Soroako
137	AMIK Ibnu Khaldun Palopo
138	Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo
139	Akademi Keperawatan Yapenas 21 Maros
140	Akademi Keperawatan Batari Toja
141	Akademi Kebidanan Kamanre Palopo
142	Akademi Kebidanan Konawe
143	Akademi Keperawatan Sawerigading Pemda Luwu
144	AKPER Putra Pertiwi Watansoppeng
145	Akademi Kebidanan Batari Toja
146	Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
147	Akademi Kebidanan Menara Primadani
148	Akademi Kebidanan Paramata Raha
149	Akademi Farmasi Yamasi Makassar
150	AKPER Mappa Oudang Makassar
151	Akademi Farmasi Toraja
152	Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja
153	Akademi Kesehatan Konawe
154	Akademi Kebidanan Mega Buana
155	Politeknik Bosowa
156	Politeknik Maritim AMI Makassar
157	Politeknik Baubau

No	Nama PT
158	Politeknik Bina Husada Kendari
159	Politeknik Sandi Karsa
160	Politeknik Indonesia
161	Politeknik Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar
162	Politeknik Bombana
163	Politeknik Kesehatan Megarezky
164	Politeknik Tridaya Virtu Morosi
165	Politeknik Muhammadiyah Makassar
166	Universitas Muslim Buton
167	Universitas Pancasakti
168	Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
169	STKIP Veteran Sidrap
170	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar
171	STIKES Bataraguru Soroaka
172	Universitas Sawerigading Makassar
173	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi
174	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
175	Akademi Keperawatan YPPP Wonomulyo
176	STISIP Veteran Palopo
177	STKIP YPUP Makassar
178	STIKES IST Buton

Tabel 14 Rekap 178 PTS yang telah memiliki SATGAS PPKPT

Program Kegiatan

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja IKK 2.3 adalah sebagai berikut :

- 1 Sosialisasi Permendikbudristek No 55 Tahun 2024;
- 2 Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Kolaborasi Itjen Kemdiktisaintek);
- 3 Internalisasi Pencegahan Korupsi di Wilayah LLDIKTI IX (Kolaborasi Itjen Kemdiktisaintek);
- 4 Bimbingan Teknis Percepatan Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
- 5 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT);
- 6 “Satu Komitmen, Seribu Aksi: Perguruan Tinggi Bersatu Wujudkan Kampus Tanpa Kekerasan”.



Gambar 25 Peningkatan Kapasitas SATGAS Pencegahan & Penanganan 5 Dosa pada PTS di LLDIKTI Wilayah IX

Kendala / Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja IKK 2.3 adalah sebagai berikut :

- 1 PTS cenderung hanya fokus pada pembentukan Satgas PPKPT, sementara aspek antitoleransi dan perundungan belum terintegrasi secara merata;
- 2 Belum semua PTS memahami bahwa SOP penanganan harus mencakup aspek Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Perundungan, Diskriminasi & Intoleransi, Kebijakan yang Mengandung Kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual;
- 3 Kegiatan masih didominasi oleh isu PPKPT, sehingga program antikorupsi dan antinarkoba kurang mendapatkan porsi sosialisasi yang memadai di tingkat pimpinan PTS;
- 4 Fokus energi PTS terserap pada transisi teknis aplikasi (Puspeka ke Belmawa), sehingga mengabaikan persiapan regulasi antitoleransi dan antiperundungan di tingkat kampus;
- 5 Kurangnya pemahaman bahwa Satgas PPKPT memiliki peran strategis dalam mencegah radikalisme (toleransi) dan perundungan, bukan sekadar menangani kasus kekerasan seksual;
- 6 Kampanye masih bersifat tunggal (fokus pada kekerasan), sehingga pimpinan PTS belum melihat kaitan erat antara kesejahteraan satgas dengan keberhasilan implementasi antinarkoba dan antikorupsi.

Strategi / Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja IKU 2.3 antara lain :

- 1 Menggabungkan isu Kekerasan (Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Perundungan, Diskriminasi & Intoleransi, Kebijakan yang Mengandung Kekerasan) dalam satu paket sosialisasi untuk efisiensi implementasi di PTS;
- 2 Mengevaluasi penyusunan SOP penanganan kekerasan dan yang mencakup mekanisme penanganan lintas isu (4+1) agar PTS dapat memenuhi indikator IKU 2.3 secara sekaligus;
- 3 Menyelipkan sesi Antikorupsi & Antinarkoba pada setiap pertemuan/bimtek PPKPT, serta mewajibkan pencantuman komitmen antikorupsi dalam dokumen MoU kerja sama antara LLDIKTI IX dan PTS;
- 4 Memberikan pendampingan teknis tidak hanya untuk sistem aplikasi Satgas (koordinasi intensif dengan Direktorat Belmawa untuk sinkronisasi data), tetapi juga memberikan checklist regulasi mandiri bagi PTS agar mereka menyadari kewajiban memenuhi poin IKU lainnya (Antinarkoba & Antikorupsi);
- 5 Mengarahkan PT untuk Menggalakkan kampanye digital melalui media sosial yang menyasar mahasiswa/dosen dan menyelenggarakan forum berbagi praktik baik antar-Satgas PPKPT;
- 6 Mempertegas komitmen pimpinan PTS terhadap kelima poin IKU 2.3 dalam satu aksi kolektif yang berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

Ketercapaian Sasaran Kegiatan 3 ini diukur oleh meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dengan 2 indikator kinerja yaitu IKK 3.1 persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus dan IKK 3.2 persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

IKK 3.1 persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

IKU 3.1 merupakan ukuran keberhasilan PTS dalam upaya untuk mendorong dan meningkatkan jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan tridharma di luar kampus. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja ini menggunakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023. Adapun kegiatan di luar kampus yang bisa dilaksanakan oleh dosen mencakup kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Adapun formula untuk menghitung indikator kinerja IKK 3.1 adalah :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

dimana :

n : jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.
t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

$$\frac{125}{222} \times 100 = 56.30\%$$

Jumlah PTS yang dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 125 PTS dari total PTS sebanyak 222 PTS. Pada tahun 2025 target kinerja dari IKK 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus sebesar 48%. Dari target kinerja yang ditetapkan oleh LLDIKTI Wilayah IX pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, yang dicapai sebesar 56.30% yang berarti mencapai target.

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	48	56.30	117.29	56
2024	30	48.01	160.03	

Tabel 15 Perbandingan Capaian IKK 3.1

Pada tahun 2025 terdapat 125 PTS yang mendorong dosen untuk berkegiatan diluar kampus, adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Nama PT
1	Universitas Islam Makassar
2	Politeknik Bosowa
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada Bulukumba
4	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Bangsa Kendari
5	Universitas Teknologi Akba Makassar
6	Universitas Patempo
7	Universitas Wira Bhakti
8	Institut Toraja Raya Indonesia
9	Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
10	Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar
12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju
13	Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare
15	Universitas Handayani Makassar
16	STITEK Dharma Yadi Makassar
17	Universitas Andi Sudirman
18	Institut Cokroaminoto Pinrang
19	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone
20	Universitas Almarisah Madani
21	Politeknik Muhammadiyah Makassar
22	Akademi Farmasi Yamasi Makassar
23	Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru

No	Nama PT
24	Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata
25	Universitas Muhammadiyah Mamuju
26	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar
27	Institut Batari Toja Bone
28	Universitas Kurnia Jaya Persada
29	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kamus Arunika
30	Akademi Kebidanan Mega Buana
31	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar
32	Universitas Tamalatea Makassar
33	Institut Teknologi dan Bisnis Kalla
34	Universitas Bosowa
35	Universitas Dipa Makassar
36	STIKES Marendeng Majene
37	Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna
38	Institut Bisnis dan Keuangan Nitro
39	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya
40	Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
41	Politeknik Baubau
42	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
43	Universitas Cahaya Prima
44	Universitas Sulawesi Tenggara
45	Akademi Kebidanan Menara Primadani
46	STKIP Andi Mattappa
47	Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional
48	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari

No	Nama PT
49	Universitas Fajar
50	Universitas Sipatokkong Mambo
51	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan
52	Institut Turatea Indonesia
53	Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara
54	Universitas Muhammadiyah Kendari
55	Universitas Lamappapoleonro
56	Universitas Muhammadiyah Palopo
57	STIKES Panakkukang
58	STIKES Amanah Makassar
59	Akademi Bahasa Asing UMI Makassar
60	Universitas Pancasakti
61	STIKS Tamalanrea Makassar
62	Universitas Karya Persada Muna
63	Institut Kesenian Makassar
64	Universitas Muhammadiyah Bone
65	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
66	Universitas Muhammadiyah Barru
67	STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya
68	Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin
69	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
70	STIM LPI Makassar
71	Sekolah Tinggi Teknik Baramuli
72	STMIK Profesional Makassar

No	Nama PT
73	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Publik Makassar
74	Universitas Mega Buana Palopo
75	Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
76	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi
77	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amika Soppeng
78	Institut Teknologi Amanna Gappa
79	Universitas Muslim Maros
80	STIKES IST Buton
81	Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja
82	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar
83	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros
84	Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
85	Universitas Kristen Indonesia Paulus
86	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene
87	Universitas Muhammadiyah Makassar
88	Universitas Indonesia Timur
89	Universitas Puangrimaggalatung
90	Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa
91	Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya
92	Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
93	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
94	Institut Teknologi Kelautan Buton
95	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris
96	Politeknik Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

No	Nama PT
97	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari
98	Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur
99	Politeknik Paramata Raha
100	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapi Bone
101	Universitas Sawerigading
102	Universitas Cokroaminoto Makassar
103	Universitas Patria Artha
104	Universitas Muslim Indonesia
105	Politeknik Dewantara
106	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin
107	Universitas Lakidende Unaaha
108	Universitas Megarezky
109	AKPER Putra Pertiwi Watansoppeng
110	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar
111	Universitas Pejuang Republik Indonesia
112	Universitas Cokroaminoto Palopo
113	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari
114	STIKES Tanawali Takalar
115	Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka
116	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Kolaka
117	Universitas Muhammadiyah Buton
118	STKIP YPUP Makassar
119	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
120	Universitas Muhammadiyah Enrekang

No	Nama PT
121	Universitas Al Asyariah Mandar
122	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika
123	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana
124	Politeknik Indonesia
125	STIKES Pelita Ibu

Tabel 16 Daftar PTS yang memenuhi IKK 3.1

Program Kegiatan

- 1 Mendorong PTS untuk melaporkan secara lengkap kegiatan tridharma dosen di luar kampus pada laman dashboard IKU PT.





Gambar 25 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

Kendala / Permasalahan

Target kinerja pada indikator kinerja kegiatan IKK 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dapat mencapai target yang ditetapkan, namun dalam perjalanannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, yaitu:

- 1 Kurang antusiasnya PTS (Dosen yang melakukan kegiatan) untuk melaporkan dan enggan untuk melaporkan karena bukan merupakan kebutuhan dan sebelumnya kegiatan dosen di luar kampus dianggap dilarang;
- 2 Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT.

Strategi / Tindak Lanjut

- 1 Mengoptimalkan sistem informasi IKU PT dalam melakukan monitoring pada setiap PTS lingkup LLDIKTI Wilayah IX;
- 2 Mendorong PTS untuk melaporkan kegiatan tridharma dosen diluar kampus dengan memberikan reward di LLDIKTI Award.

IKK 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

IKU 3.2 digunakan untuk mengukur jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerjasama dengan mitra. Kriteria kerjasama program studi mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Dengan ketentuan minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.

Adapun formula penghitungan capaian kinerja IKK 3.2, yaitu:

dimana :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n : jumlah PTS yang meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal.

t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

$$\frac{93}{222} \times 100 = 41.89\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh capaian kinerja untuk IKK 3.2 pada tahun 2025 adalah 41.89%, yang berarti belum mencapai target dari target kinerja yang ditetapkan oleh LLDIKTI Wilayah IX pada Perjanjiaan Kinerja tahun 2025 sebesar 67%. Jumlah PTS yang dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 93 PTS dari total PTS sebanyak 222 PTS.

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	67	41.89	62.52	75
2024	55	66.51	120.9	

Tabel 15 Perbandingan Capaian IKK 3.2

No	Nama PT
1	Universitas Al Asyariah Mandar
2	Universitas Tomakaka
3	Universitas Muhammadiyah Mamuju
4	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
5	STIKES Marendeng Majene
6	Universitas Muslim Indonesia
7	Universitas Kristen Indonesia Paulus
8	Universitas Muhammadiyah Makassar
9	Universitas Pepabri Makassar
10	Universitas Atma Jaya Makassar
11	Universitas Sawerigading

No	Nama PT
12	Universitas Pancasakti
13	Universitas Kristen Indonesia Toraja
14	Universitas Andi Djemma
15	Universitas Muhammadiyah Pare-pare
16	Universitas Islam Makassar
17	Universitas Indonesia Timur
18	Universitas Cokroaminoto Palopo
19	Universitas Fajar
20	Universitas Patria Artha
21	Universitas Bosowa
22	Universitas Muslim Maros
23	Universitas Megarezky
24	Universitas Puangrimaggalatung
25	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
26	Universitas Muhammadiyah Palopo
27	Universitas Muhammadiyah Bulukumba
28	Universitas Muhammadiyah Sinjai
29	Universitas Muhammadiyah Enrekang
30	Universitas Mega Buana Palopo
31	Universitas Muhammadiyah Bone
32	Universitas Dipa Makassar
33	Universitas Lamappapoleonro
34	Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

No	Nama PT
35	Universitas Teknologi Akba Makassar
36	Universitas Patompo
37	Universitas Handayani Makassar
38	Universitas Sipatokkong Mambo
39	Universitas Almarisah Madani
41	Institut Teknologi dan Bisnis Kalla
42	INSTITUT TEKNOLOGI PERTANIAN
43	Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin
44	Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
45	Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
46	Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
47	Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar
48	Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru
49	STKIP YPUP Makassar
50	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
51	STIKS Tamalanrea Makassar
52	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI
53	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar
54	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar
55	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju
56	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
57	STKIP Andi Mattappa
58	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin

No	Nama PT
59	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris
60	STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya
61	STIKES Panakkukang
62	STIKES Lakipadada
63	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makasar
64	STIKES Amanah Makassar
65	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada Bulukumba
66	STIKES Bataraguru Soroaka
67	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar
68	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare
69	AKPER Putra Pertiwi Watansoppeng
70	Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
71	Akademi Kebidanan Menara Primadani
72	Akademi Farmasi Yamasi Makassar
73	Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja
74	Politeknik Bosowa
75	Politeknik Sandi Karsa
76	Politeknik Kesehatan Megarezky
77	Universitas Dayanu Ikhsanuddin
78	Universitas Sulawesi Tenggara
79	Universitas Lakidende Unaaha
80	Universitas Muhammadiyah Buton
81	Universitas Muhammadiyah Kendari

No	Nama PT
82	Universitas Muslim Buton
83	Universitas Mandala Waluya
84	Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
85	Universitas Karya Persada Muna
86	Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna
87	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi
88	Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya
89	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha
90	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari
91	STIKES Pelita Ibu
92	Politeknik Baubau
93	Politeknik Bombana

Tabel 16 Daftar PTS yang memenuhi IKK 3.2

Program Kegiatan

- 1 Mendorong PT untuk melakukan kerjasama dengan IDUKA;
- 2 Fasilitasi peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi (Match Making).





Gambar 26 Siaran Kanal

Kendala / Permasalahan

- 1 Banyak program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra dan memiliki Mou/MoA/IA yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra namun belum ada implementasinya;
- 2 Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT.

Strategi / Tindak Lanjut

- 1 Fasilitasi peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi (Match Making);
- 2 Menghimbau perguruan tinggi untuk melaporkan data kerjasama pada aplikasi Laporkerma.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

Ketercapaian Sasaran Kegiatan 4 ini diukur oleh meningkatnya tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dengan 2 indikator kinerja yaitu IKK 4.1 predikat SAKIP dan 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

IKK 4.1 predikat SAKIP

Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kriteria penilaian SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meliputi :

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%

Tabel 17 Kriteria Penilaian 2025

Range nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB berkisar dari 0 hingga 100, dibagi menjadi beberapa predikat: AA (90-100), A (80-90), BB (70-80), B (60-70), CC (50-60), C (30-50), dan D (0-30). Predikat tertinggi (AA/A) menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, efisien, dan berorientasi hasil.

Berikut adalah rincian kategori dan range nilai SAKIP:

Predikat	Kategori	Range Nilai
AA	Sangat Memuaskan	90-100
A	Memuaskan	80-90
BB	Sangat Baik	70-80
B	Baik	60-70

Predikat	Kategori	Range Nilai
CC	Cukup/Memadai	50-60
C	Kurang	30-50
D	Sangat Kurang	0-30

Tabel 18 Kategori dan *range* nilai SAKIP

Adapun rincian penilaian SAKIP LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025 sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	26.1
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	89.1

Tabel 19 Nilai SAKIP LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah IX mendapatkan predikat SAKIP dalam kategori A dengan nilai 89,10 dimana mengalami kenaikan nilai dari tahun 2024 yaitu sebesar 88.80 namun belum mencapai predikat AA yang menjadi target capaian untuk tahun 2025.

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	AA	A	99	AA
2024	AA	A	98.66	

Tabel 20 Perbandingan Capaian IKK 4.1

Program Kegiatan

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja IKK 4.1 adalah sebagai berikut :

- 1 Rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam mendukung penilaian indikator evaluasi kinerja internal pada dokumen SAKIP;

- 2 Studi Tiru Implementasi SAKIP pada Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI;
- 3 Pengukuran capaian kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing PIC IKU.



Gambar 27 Kegiatan Penyusunan Renstra 2025-2029



Gambar 28 Study Tiru Pengelolaan SAKIP LLDIKTI Wilayah XI

Kendala / Permasalahan

Kendala – kendala dalam meningkatkan persentase IKK 4.1 adalah :

- 1 Adanya perubahan program kementerian sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU perlu disesuaikan;
- 2 Pemberian reward atas penilaian kinerja sampai saat ini belum dilaksanakan sebagai salah satu penunjang dalam indikator evaluasi kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut

Adapun strategi yang akan dilakukan ialah :

- 1 Menyusun pedoman pemberian reward atas penilaian kinerja;
- 2 Memantau pencapaian target kinerja setiap triwulan.

IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian berdasarkan aspek penyerapan anggaran dan pencapaian target-target kinerja serta pengelolaan perbendaharaannya. Nilai Kinerja Anggaran ini berasal dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Adapun nilai IKPA tahun 2025 adalah 99,98%, sedangkan Nilai EKA adalah 100%. Maka nilai NKA untuk tahun 2025 ialah sebesar 99,99%, dimana nilai ini naik sekitar 0,06% dari target capaian yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan naik 0,73% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 nilai NKA sebesar 99,28%.

Tahun	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra 2029
2025	99.3	99.99	100.69	99.7
2024	99.3	99.26	99.95	

Tabel 21 Perbandingan Capaian IKK 4.2

Program Kegiatan

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja IKK 4.2 adalah sebagai berikut :

- 1 Monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala;

- 2 Monitoring Realisasi Anggaran dan Capaian Output setiap bulan;
- 3 Koordinasi aktif antara tim perencana, pelaksana kegiatan dan keuangan;
- 4 Pertanggungjawaban UP dan TUP secara tepat waktu;
- 5 Mendorong penggunaan transaksi KKP sehingga mencapai target;
- 6 Menyelesaikan seluruh tagihan secara tepat waktu;
- 7 Kepatuhan terhadap ketentuan dan batas waktu penyampaian SPM untuk menghindari adanya dispensasi SPM di akhir tahun anggaran;
- 8 Mengajukan TUP sesuai kebutuhan riil dan jangka waktu penggunaannya, serta mempercepat penyampaian SPJ TUP;
- 9 Meminimalkan penyeteroran sisa UP dan TUP di akhir tahun.



Gambar 29 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran TPD TKGB

Kendala / Permasalahan

Kendala – kendala dalam meningkatkan persentase IKU 4.2 adalah :

- 1 Penyerapan anggaran yang belum merata sehingga masih terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun;
- 2 Proses revisi yang memerlukan waktu dan berdampak pada jadwal kegiatan dan realisasi anggaran;
- 3 Adanya tambahan alokasi anggaran dari Kementerian sebesar 1 Milyar pada bulan September sehingga terdapat beberapa tambahan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Triwulan IV.

Strategi / Tindak Lanjut

Adapun strategi yang akan dilakukan ialah :

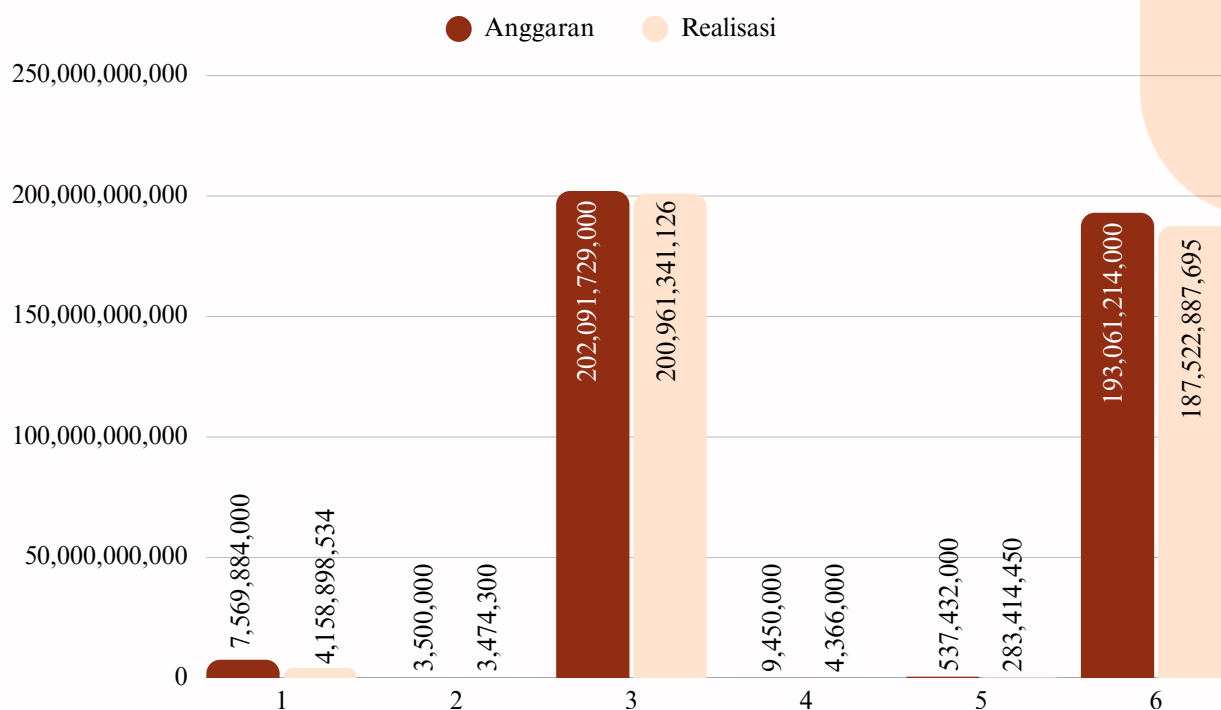
- 1 Fokus terhadap target penyerapan setiap triwulan dengan memperhatikan target setiap jenis belanja agar dapat terpenuhi;
- 2 Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan dan menghindari adanya penumpukan realisasi diakhir tahun anggaran;
- 3 Rapat koordinasi setiap bulan dengan pimpinan dan tim kerja;
- 4 Menjaga deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5%;
- 5 Meminimalisir adanya revisi anggaran dengan melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal;
- 6 Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran dan keuangan negara.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran LLDIKTI Wilayah IX dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp403.273.209.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp392.934.382.105 dengan persentase daya serap sebesar 97.44%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 sasaran dengan 9 indikator kinerja. Adapun rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan DIPA LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025 kategori Rincian Output (RO) yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025, yaitu:



1. Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi
3. Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi
4. Layanan BMN
5. Layanan Umum
6. Layanan Perkantoran

Gambar 30 Anggaran serta Realisasi Anggaran tahun 2025 berdasarkan RO

2. Efisiensi Anggaran

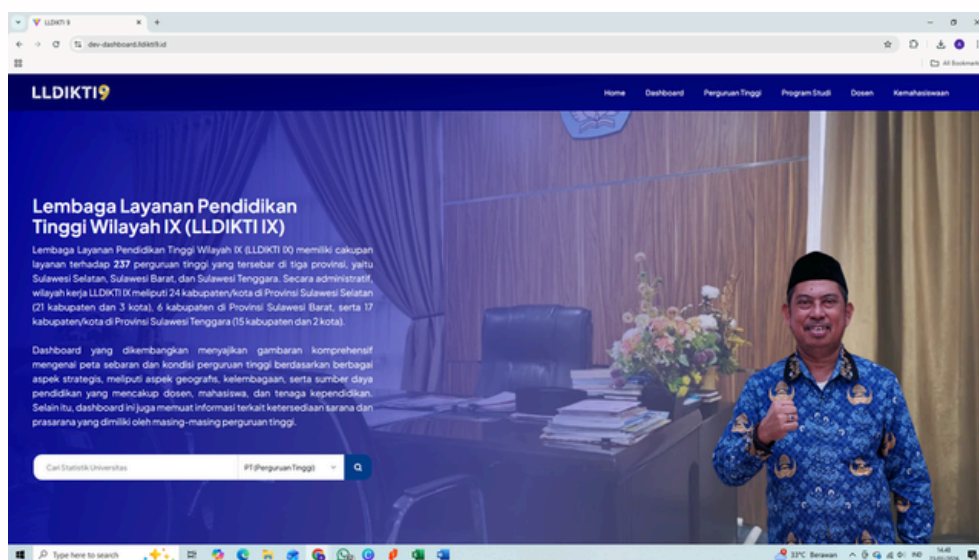
Pada tahun 2024 Pagu LLDIKTI Wilayah IX sebesar Rp307,353,993,000 dengan realisasi Rp306,314,423,308 (99,66%), dengan sisa anggaran 0,03%, rata-rata capaian kinerja naik signifikan menjadi 130,37% dari 9 indikator kinerja utama akan tetapi terdapat 3 IKU yang tidak memenuhi target.

Pada tahun 2025 sisa anggaran sebesar Rp10.338.826.895 atau 2.56% (termasuk anggaran yang diblokir) dari anggaran Rp403.273.209.000. dengan rata-rata capaian adalah 81.43% dari 9 Indikator Kinerja Utama.

C Inovasi, Penghargaan dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX terus melakukan inovasi untuk kemajuan instansi dan peningkatan layanan. Dalam upaya meningkatkan layanan dan kemudahan informasi mengenai Perguruan Tinggi lingkup LLDIKTI Wilayah IX, untuk tahun 2025 LLDIKTI Wilayah IX berinovasi menerapkan Sistem Dashboard yang dikembangkan menyajikan gambaran komprehensif mengenai peta sebaran dan kondisi perguruan tinggi berdasarkan berbagai aspek strategis, meliputi aspek geografis, kelembagaan, serta sumber daya pendidikan yang mencakup dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Selain itu, dashboard ini juga memuat informasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Dashboard ini dapat diakses melalui link <https://dev-dashboard.lldikti9.id/> oleh siapapun yang membutuhkan informasi mengenai Perguruan Tinggi lingkup LLDIKTI Wilayah IX.



Gambar 31 Tampilan Laman Aplikasi Dashboard

Serta masih banyak inovasi yang masih terus dikembangkan seperti Simpeg, Helpdesk dan Aplikasi Serdos. Adapun aplikasi yang sudah ada namun tetap dikembangkan fiturnya seperti Sijokka, Lontara, dan Sicabe.

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya adalah :

1. IKPA Terbaik II Semester I Tahun 2025



Gambar 32 Piagam Penghargaan IKPA Terbaik II

2. Bronze Winner, Anugerah Humas Diktisaintek Sub Kategori Siaran Pers
3. Bronze Winner, Anugerah Humas Diktisaintek, Sub Kategori Laman
4. Silver Winner, Anugerah Humas Diktisaintek Sub Kategori Unit Layanan Terpadu



Gambar 33 Plakat Penghargaan Anugerah Humas Diktisaintek

5. LLDIKTI Terbaik, Anugerah Pendidikan Tinggi Kategori Rekognisi Pembelajaran Lampau, Sub Kategori LLDIKTI Terbaik dalam Melakukan Verifikasi Rekognisi Pembelajaran Lampau
6. Terbaik II, Anugerah Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Kategori Pengelola KIP Kuliah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Gambar 34 Plakat Penghargaan Anugerah Pendidikan Tinggi dan Anugrah Pembiayaan

3. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar melakukan program crosscutting/collaborative dengan sejumlah lembaga, yaitu :

1. Memorandum of Understanding Beetween Excelsia University College Australia (12 PTS)

Program ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara para pihak di bidang Pendidikan Transnasional, dengan tujuan menyelenggarakan program akademik bagi Mahasiswa yang berada di Indonesia, dengan tetap menjaga standar akademik internasional. Para Pihak dengan ini berkomitmen untuk:

- Pengembangan dan penyelenggaraan program akademik bersama, ganda (dual), atau tervalidasi;
- Pembentukan perjanjian waralaba atau pendirian kampus cabang;
- Pengaturan skema artikulasi program dan mekanisme pengakuan serta alih kredit mata kuliah;
- Program pertukaran dosen dan mahasiswa;

- e. Pelaksanaan penelitian bersama dan kolaborasi ilmiah;
- f. Pengembangan bersama kurikulum, silabus/RPS, serta bahan dan sumber pembelajaran;
- g. Pemanfaatan bersama sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System/LMS) dan teknologi pembelajaran.



Gambar 35 Memorandum of Understanding Between Excelsia University College Australia



Gambar 36 Memorandum of Understanding Beetween Excelsia University College Australia

No	Nama PT
1	Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
2	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari
3	STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
4	Universitas Bosowa
5	Universitas Cahaya Prima
6	Universitas Kurnia Jaya Persada
7	Universitas Lamappapoleonro

No	Nama PT
8	Universitas Muhammadiyah Buton
9	Universitas Sulawesi Tenggara Kendari
10	Universitas Sawerigading
11	Universitas Mega Buana Palopo
12	Universitas Cokroaminoto Palopo

Table 22 Daftar PTS yang mengikuti Penandatanganan Kerja Sama

2. Memorandum of Understanding Between Study Cairns

Program ini bertujuan untuk membangun kerja sama kolaboratif antara Study Cairns dan LLDIKTI Wilayah IX untuk mempromosikan kerja sama timbal balik di bidang Pendidikan tinggi, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kapasitas. MOU ini mendukung proyek dan kegiatan tertentu dengan rincian dalam perjanjian-perjanjian berikut:

- a. Kerja sama di bidang akademik yang mencakup penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Bersama;
- b. Pengembangan kapasitas bagi staf dan administrator universitas;
- c. Program pertukaran mahasiswa, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- d. Pertukaran dosen dan peneliti;
- e. Penelitian kolaboratif dan publikasi bersama;
- f. Workshop, seminar, konferensi, dan kegiatan akademik atau pengembangan professional lainnya;
- g. Promosi jalur Pendidikan internasional dan pengalaman pembelajaran global;
- h. Study tours (termasuk kunjungan pengembangan professional ke sektor korporasi dan pemerintahan).



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between
Study Cairns
Shop 2, 93 Lake Street
Number: _____
And

Higher Education Service Institute (LLDIKTI) Region IX
Jalan Bung Km.9, South Sulawesi, Indonesia 90245
Number: _____

1. PARTIES

This Memorandum of Understanding (MoU) is made and entered into by and between: Study Cairns, the peak body representing the international education and training sector in Cairns, Queensland, Australia; and Higher Education Service Institute (LLDIKTI) Region IX, a section under the Ministry of Education, Science and Technology, Republic of Indonesia, which facilitates quality improvement across higher education institutions in South Sulawesi, West Sulawesi, and Southeast Sulawesi, overseeing 225 private universities.

Participating Institutions from Study Cairns:

1. James Cook University
2. Central Queensland University
3. TAFE Queensland
4. Cairns College of English & Business
5. EIM Training
6. Sun Pacific College

Participating Institutions from LLDIKTI Region IX:

1. Institut Teknologi & Bisnis Maritim Balikpapan
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
4. Universitas Bosowa
5. Universitas Cahaya Prima
6. Universitas Kurnia Jaya Persada
7. Universitas Lamappapoleonro
8. Universitas Mega Buana Palopo
9. Universitas Sowerigading
10. Universitas Muhammadiyah Buton
11. Universitas Sulawesi Tenggara
12. Universitas Cokroaminoto Palopo

2. PURPOSE

The purpose of this MoU is to establish a collaborative framework between Study Cairns and LLDIKTI Region IX to promote mutual cooperation in the fields of higher education, training, research, and capacity building. This MoU serves as an umbrella agreement to support specific projects and activities to be further defined in subsequent agreements.

3. AREAS OF COOPERATION

The Parties agree to cooperate in the following areas, subject to mutual consent and availability of resources:

1. Academic collaboration, including joint educational and training programs;
2. Capacity building for university staff and administrators;
3. Student exchange programs, both short-term and long-term;
4. Lecturer and researcher exchanges;
5. Collaborative research and joint publications;
6. Workshops, seminars, conferences, and other academic or professional development events;
7. Promotion of international education pathways and global learning experiences.
8. Study Tours (including corporate and government professional development tours)

4. IMPLEMENTATION

- Specific activities and obligations of each party under this MoU will be outlined in separate agreements (e.g., Memoranda of Agreement or Contracts), to be developed and signed by both Parties.
- Each Party shall designate a representative to coordinate and monitor the implementation of this MoU.

5. DURATION AND TERMINATION

- This MoU shall be effective from the date of signing and shall remain in force for a period of five (5) years, unless terminated earlier by either Party.
- Either Party may terminate this MoU by giving 90 days' prior written notice to the other Party.
- Termination shall not affect ongoing projects or obligations under separate agreements entered into during the term of this MoU.

6. GENERAL PROVISIONS

- This MoU does not create any legally binding obligations but reflects the intention of both Parties to collaborate in good faith.
- Any financial implications will be negotiated and outlined in specific agreements.
- This MoU may be amended by mutual written consent of both Parties.

7. SIGNATORIES

IN WITNESS WHEREOF, the authorised representatives of the Parties have executed this Memorandum of Understanding on the dates indicated below.

For Study Cairns

Name : Suha McCartney
Position : Executive Officer
Date : 22nd August, 2025

Signature: _____

For LLDIKTI Region IX

Name : Professor Andi Lukman
Position : Head of LLDIKTI Region IX
Date : 22nd August, 2025

Signature: _____

LIST OF PARTICIPANTS

No	Institution Name	Delegation	Position	Signature
1	 Institut Teknologi & Bisnis Maritim Balikpapan	Dr Muh Ikromulloh Akmal S.Sos, M.Si	Vice-Chancellor	
2	 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari	Ichsanuddin Akbar	Chairperson	
3	 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara	A. Rahmawati	Lecturer in Management	
4	 Universitas Bosowa	Prof. Dr. Ir. Zulkifli Maulana, M.P	Vice-Chancellor	
5	 Universitas Cahaya Prima	Prof. Dr. Dra. Hj. A. Cahaya, M.Si	Deputy Vice Chancellor	
6	 Kurnia Jaya Persada	dr indah mustikasari, S.Ked., MARS	Chairperson	
7	 Universitas Lamappapoleonro	Dr.Hj.Andi Aodawiah,SE,MM	Vice-Chancellor	
8	 Universitas Mega Buana Palopo	Prof. Dr. Nilawati Uly,S.Si,Apt,M.Kes,CIPA	Vice-Chancellor	
9	 Universitas Sowerigading	Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH, MH	Vice-Chancellor	
10	 Universitas Muhammadiyah Buton	Dr. Hj. Wa Ode Al Zorliani, S.P., M.M	Vice-Chancellor	
11	 Universitas Sulawesi Tenggara	Prof.DR.Ir.Andi Bohrun, M.SC.AGRIC	Vice-Chancellor	
12	 Universitas Cokroaminoto Palopo	Awaluddin Suruman, ST	Chairperson	

Gambar 37 Memorandum of Understanding Between Study Cairns Australia

ANUGERAH LLDIKTI IX TAHUN 2025

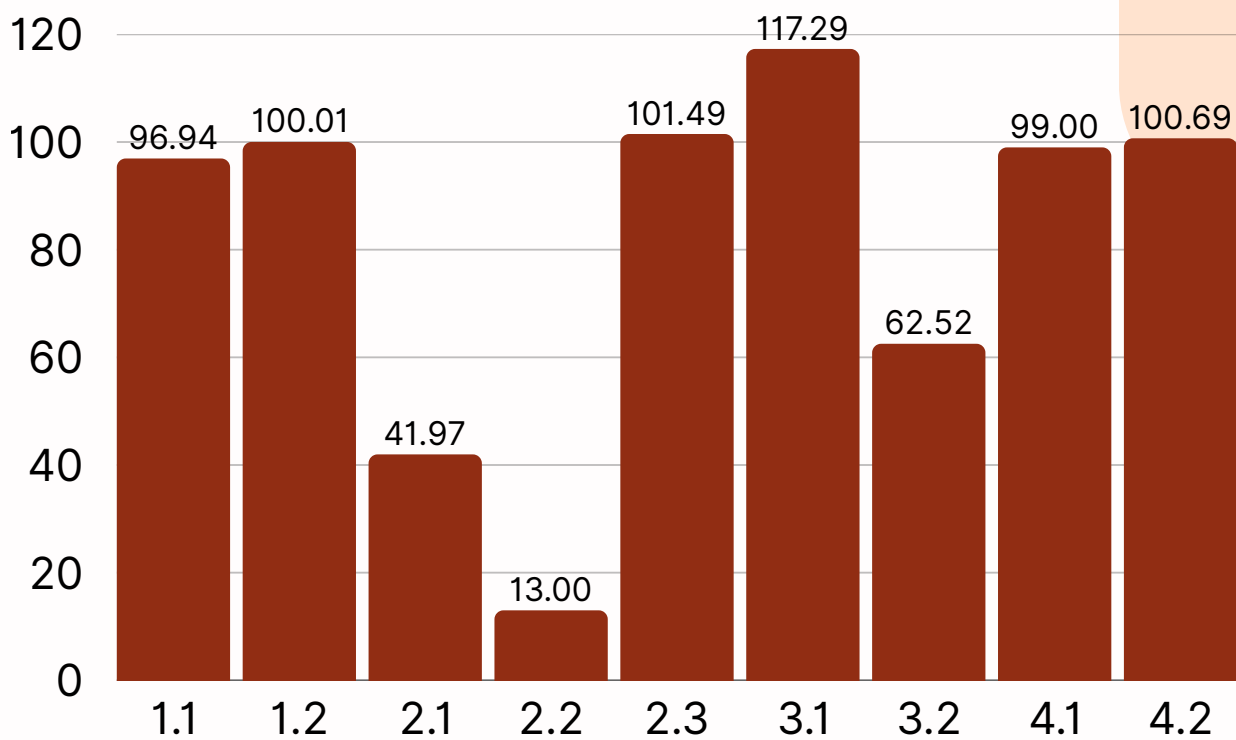


BAB 4

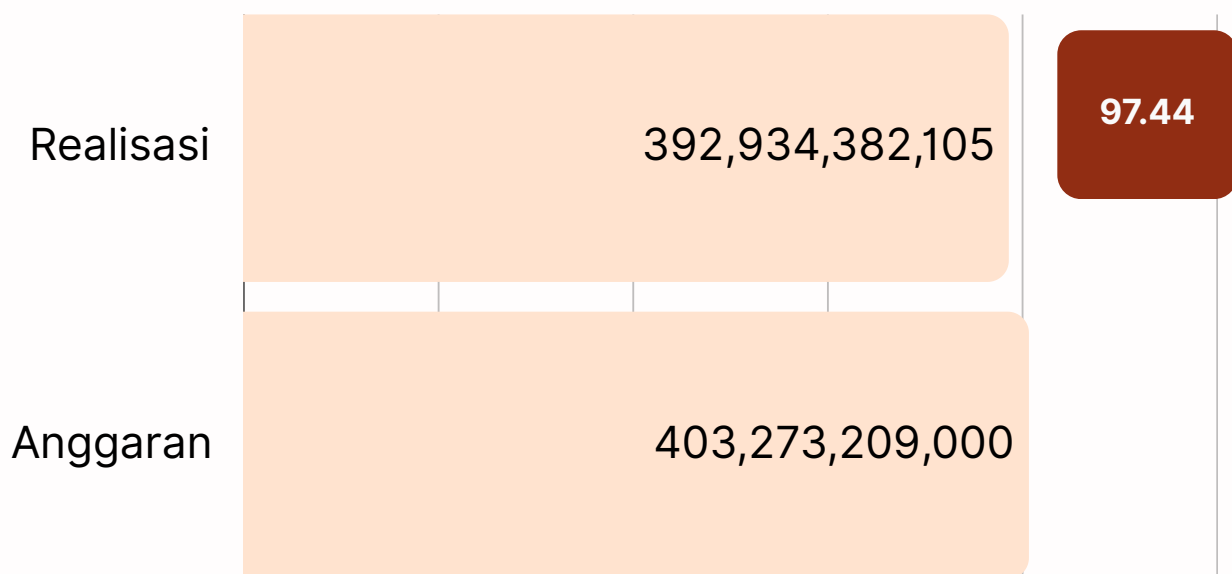
Penutup

Selama tahun 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja untuk 9 IKK dan kinerja keuangan.





Gambar 38 Capaian Kinerja Kegiatan



Gambar 39 Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja LLDIKTI Wilayah IX tahun 2025 yang mampu dicapai dari 9 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 4 IKK terpenuhi dan melampaui target. Sedangkan 5 IKK tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Secara keseluruhan kinerja LLDIKTI Wilayah IX menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada 4 IKK yang melampaui target dengan rata-rata capaian 104.87%. Sedangkan 5 IKK dengan kategori kinerja dibawah target sehingga akan diambil langkah prioritas untuk menindaklanjuti semua kendala yang menghambat pencapaian target di tahun 2025.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1 Penilaian rendah pada beberapa indikator kepuasan layanan yaitu waktu layanan, desain antarmuka aplikasi layanan utama LLDIKTI dan keamanan aplikasi;
- 2 Kebijakan MBKM diawal tahun 2025 diganti dengan Kampus berdampak, sehingga sebahagian perguruan tinggi tidak lagi melanjutkan program MBKM di kampus;
- 3 Penambahan jumlah persentase data mahasiswa berprestasi belum terjadi kenaikan disebabkan data mahasiswa berprestasi belum diberikan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek;
- 4 Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT;
- 5 Predikat SAKIP tidak mencapai disebabkan belum adanya metode atau acuan dalam pemberian reward dan punishment, serta draft Renstra yang masih membutuhkan perbaikan dan diformalkan oleh pimpinan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang ditandai dengan adanya perubahan signifikan pada struktur dan kebijakan kementerian. Perubahan tersebut berimplikasi pada penyesuaian arah kebijakan kementerian, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 belum ditetapkan secara formal. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), di mana sebagian IKK belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya perubahan program, target, dan sasaran kinerja kementerian.

AWARD 2025

20 Desember 2025
Dian Auci ... G ... k ... ar

LLDIKTI IX
AWARD

LAMPIRAN

ANUGERAH LLDIKTI IX
TAHUN 2025

LLDIKTI IX
AWARD
2025

A. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

1. Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Lukman
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Makassar, 25 April 2025



Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	87

[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	44
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	10
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	79
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	48
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	67
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[4.1] Predikat SAKIP	AA
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99,3

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp196.874.832.000
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp125.771.062.000
Total Anggaran			Rp322.645.894.000



Makassar, 25 April 2025

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX

Andi Lukman
NIP 196708171993031001

2. Perjanjian Kinerja Akhir



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Lukman
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

Makassar, 6 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IX
Andi Lukman



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	87
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	44
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	10
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antibekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	79
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	48
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	67
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99.3

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp209.665.113.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp193.608.096.000
Total Anggaran			Rp403.273.209.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi

Makassar, 6 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan
 Pendidikan Tinggi Wilayah IX
 Andi Lukman



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
 Sertifikasi
 Elektronik**

B. Pengukuran Kinerja

1. Triwulan I



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93	%	80	90.76
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	87	%	85	82.66
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	44	%	43	32.60
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	10	%	5	5
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	79	%	75	56
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	48	%	45	54.01
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	67	%	65	68.75
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.3	Nilai	0	0



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Internalisasi budaya kerja pada rapat kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Kendala/Permasalahan

1. Belum terdapat tim khusus yang ditugaskan untuk menangani survei kepuasan masyarakat.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Perlu dibentuk unit khusus yang ditugaskan untuk menangani survei kepuasan masyarakat.
2. Dapat bekerjasama dengan tim independent seperti BPS, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang terpercaya.
3. Penyesuaian instrumen agar penilaian lebih objektif.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Program percepatan akreditasi perguruan tinggi (APT) yang dilaksanakan oleh BAN-PT
2. Bimbingan Teknis penyusunan Borang Akreditasi – (Mandiri).

Kendala/Permasalahan

1. PTS tidak memiliki aktivitas pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Jumlah dosen yang tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal dosen per program studi.
3. PTS belum menyusun secara lengkap dokumen LKPT dan LED.
4. Beberapa PTS tidak mempunyai kemampuan secara finansial dalam menyusun Borang Akreditasi secara Mandiri.
5. PTS yang telah berubah bentuk belum menyesuaikan akreditasi pada BAN PT disebabkan oleh belum dilakukannya migrasi data.
6. Terdapat PTS berstatus sanksi Administrasi Berat (Pembinaan).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong PT tidak terakreditasi untuk melakukan penggabungan/penyatuan.
2. Bagi PTS yang akan mengusulkan Prodi baru, harus terakreditasi Institusi.
3. Bagi PTS yang akan wisuda harus terakreditasi Institusi.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

1. Belum ada pelaporan data MBKM dari Perguruan Tinggi, dikarenakan adanya perubahan kebijakan MBKM baik dari nomenklatur maupun beberapa program menyesuaikan dengan kebijakan program saat ini yaitu Diktisaintek Berdampak.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan nomenklatur dari MBKM menjadi Diktisaintek Berdampak, sehingga beberapa program juga dilakukan penyesuaian.
2. Salah satu program Diktisaintek berdampak yaitu Program Magang Berdampak 2025, yang diselenggarakan oleh Kemendiktisaintek, dibuka pendaftarannya mulai 16 Juni hingga 11 Juli 2025, sehingga belum bisa diperoleh datanya.
3. Belum ada laporan dari Perguruan Tinggi terkait kegiatan pembelajaran diluar program studi melalui program kegiatan Diktisaintek Berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menghimbau Perguruan Tinggi untuk segera melaporkan kegiatan pembelajaran diluar program studi melalui program kegiatan Diktisaintek Berdampak.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. Workshop Penyusunan Proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
2. Workshop Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
3. Workshop Penyusunan Proposal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW).

Kendala/Permasalahan

1. Terdapat beberapa PTS yang sudah melaksanakan MBKM tetapi belum melaporkannya sebagai aktivitas MBKM di PD Dikti.
2. Masih terdapat PTS yang belum memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti program MBKM.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Sebelum melakukan kegiatan, TIM Kemahasiswaan melakukan koordinasi minimal 1 (satu) minggu sebelum jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi perubahan peraturan satgas PPKS menjadi PPKPT melalui zoom meeting oleh direktorat jenderal belmawa secara menyeluruh kepada PTS.
2. Sosialisasi perubahan satgas PPKS menjadi satgas PPKPT melalui surat dan sosmed LLDIKTI9.
3. Permintaan perubahan satgas PPKS PT menjadi satgas PPKPT melalui surat kepada pimpinan PT.

Kendala/Permasalahan

1. Jadwal narasumber (dir belmawa) yang padat menjadi kendala pelaksanaan sosialisasi awal tepat waktu.
2. Pergantian pejabat dir belmawa juga menjadi salah satu kendala keterlambatan sosialisasi.
3. Pergantian PIC dari puspeka menjadi belmawa berdampak pada keterlambatan fungsi LMS sebagai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- sarana seleksi satgas baru.
4. Efisiensi Anggaran menyebabkan banyak kegiatan yang tidak berjalan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan dir belmawa baru.
2. Rencana Sosialisasi tetap dilakukan oleh ketua satgas Sdosa Ildikti9 (Kabag Umum).
3. Terus menagih perubahan satgas pada PTS.
4. Sosialisasi berkala melalui medsos Ildikti9.
5. Jemput bola dengan percepatan pembentukan satgas ppkpt.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

1. Mendorong PTS untuk melaporkan secara lengkap kegiatan tridharma dosen di luar kampus pada laman dashboard IKU PT.

Kendala/Permasalahan

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan workshop di 3 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara menyebabkan jumlah peserta dibatasi.
2. Banyak dosen yang memiliki kegiatan tridharma di luar kampus namun sampai sekarang tidak ada MoU yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra.
3. Kurang antusiasnya PTS untuk melaporkan dan enggan untuk melaporkan karena bukan merupakan kebutuhan dan sebelumnya kegiatan dosen di luar kampus dianggap dilarang.
4. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Perlunya persediaan anggaran yang tidak membatasi jumlah peserta sehingga PTS mendapat kouta peserta yang adil serta.
2. Perlunya memberikan pemahaman bahwa kegiatan dosen di luar kampus diperbolehkan selama mengikuti aturan yang berlaku serta MoU yang mengikat dan diketahui kemudian ditandatangani oleh pimpinan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan IDUKA.

Kendala/Permasalahan

1. Banyak program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra namun tidak ada Mou/MoA/IA yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra.
2. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

1. Fasilitasi peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi (*Match Making*).
2. Menghimbau perguruan tinggi untuk melaporkan data kerjasama pada aplikasi Laporkerma.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

1. Rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam mendukung penilaian indikator evaluasi kinerja internal pada dokumen SAKIP.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan yang dilakukan oleh Tim SAKIP kepada masing-masing PIC/penanggungjawab IKU.
3. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing PIC IKU.

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan program kementerian sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU perlu disesuaikan.
2. Pemberian reward atas penilaian kinerja sampai saat ini belum dilaksanakan sebagai salah satu penunjang dalam indikator evaluasi kinerja.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun pedoman pemberian reward atas penilaian kinerja tahun 2025.
2. Memantau pencapaian target kinerja setiap triwulan.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II.
2. Melakukan pendaftaran kontrak pada semester I.
3. Pengisian Capaian Output secara tepat waktu.
4. Melakukan revolving uang persediaan secara tepat waktu.

Kendala/Permasalahan

1. Indikator penyerapan Anggaran yang belum maksimal disebabkan karena adanya revisi anggaran dari beberapa kegiatan sehingga beberapa kegiatan belum bisa terlaksana, adanya perubahan anggaran (pemotongan anggaran, adanya restrukturisasi komponen RAB akibat dari perubahan alokasi DIPA 2025).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Fokus terhadap target penyerapan Triwulan III dengan memperhatikan target setiap jenis belanja agar dapat terpenuhi.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
3. Menjaga deviasi tidak lebih dari 5%.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	20	229	Rp7.569.884.000	Rp2.466.948.704	32.59
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	5	50	Rp3.500.000	Rp1.545.300	44.15
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5244	5244	Rp203.634.729.000	Rp150.135.010.195	73.73
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	1	Rp9.450.000	Rp316.000	3.34
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp537.432.000	Rp195.927.000	36.46
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp194.185.214.000	Rp152.597.521.286	78.58
Total Anggaran					Rp405.940.209.000	Rp305.397.268.485	75.23

D. Rekomendasi Pimpinan

Seluruh tim kerja terkait segera menyusun rencana aksi untuk Triwulan II sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025. Capaian pada triwulan berikutnya diupayakan harus mencapai target yang telah disepakati bersama.

MAKASSAR, 24 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA
 Andi Lukman



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Triwula II



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Laporan Kinerja Triwulan II
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar
Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93	%	85	90.20
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	87	%	86	88
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	44	%	43	43.61
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	10	%	5	6
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	79	%	75	75
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	48	%	45	59.37
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	67	%	65	70.08
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.3	Nilai	0	0



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Evaluasi Prosedur Operasional Standar.

Kendala/Permasalahan

1. Belum terdapat tim khusus yang ditugaskan untuk menangani survei kepuasan masyarakat.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Perlu dibentuk unit khusus yang ditugaskan untuk menangani survei kepuasan masyarakat.
2. Dapat bekerjasama dengan tim independent seperti BPS, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang terpercaya.
3. Penyesuaian instrumen agar penilaian lebih objektif.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Program percepatan akreditasi perguruan tinggi (APT) yang dilaksanakan oleh BAN-PT
2. Bimbingan Teknis penyusunan Borang Akreditasi – (Mandiri).

Kendala/Permasalahan

1. PTS tidak memiliki aktivitas pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Jumlah dosen yang tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal dosen per program studi.
3. PTS belum menyusun secara lengkap dokumen LKPT dan LED.
4. Beberapa PTS tidak mempunyai kemampuan secara finansial dalam menyusun Borang Akreditasi secara Mandiri.
5. PTS yang telah berubah bentuk belum menyesuaikan akreditasi pada BAN PT disebabkan oleh belum dilakukannya migrasi data.
6. Terdapat PTS berstatus sanksi Administrasi Berat (Pembinaan).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong PT tidak terakreditasi untuk melakukan penggabungan/penyatuan.
2. Bagi PTS yang akan mengusulkan Prodi baru, harus terakreditasi Institusi.
3. Bagi PTS yang akan wisuda harus terakreditasi Institusi.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

1. Belum ada pelaporan data MBKM dari Perguruan Tinggi, dikarenakan adanya perubahan kebijakan MBKM baik dari nomenklatur maupun beberapa program menyesuaikan dengan kebijakan program saat ini yaitu Diktisaintek Berdampak.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan nomenklatur dari MBKM menjadi Diktisaintek Berdampak, sehingga beberapa program juga dilakukan penyesuaian.
2. Salah satu program Diktisaintek berdampak yaitu Program Magang Berdampak 2025, yang diselenggarakan oleh Kemendiktisaintek, dibuka pendaftarannya mulai 16 Juni hingga 11 Juli 2025, sehingga belum bisa diperoleh datanya.
3. Belum ada laporan dari Perguruan Tinggi terkait kegiatan pembelajaran diluar program studi melalui program kegiatan Diktisaintek Berdampak.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menghimbau Perguruan Tinggi untuk segera melaporkan kegiatan pembelajaran diluar program studi melalui program kegiatan Diktisaintek Berdampak

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. Workshop Penyusunan Proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
2. Workshop Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
3. Workshop Penyusunan Proposal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW).

Kendala/Permasalahan

1. Terdapat beberapa PTS yang sudah melaksanakan MBKM tetapi belum melaporkannya sebagai aktivitas MBKM di PD Dikti.
2. Masih terdapat PTS yang belum memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti program MBKM.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Sebelum melakukan kegiatan, TIM Kemahasiswaan melakukan koordinasi minimal 1 (satu) minggu sebelum jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi perubahan peraturan satgas PPKS menjadi PPKPT melalui zoom meeting oleh direktorat jenderal belmawa secara menyeluruh kepada PTS.
2. Sosialisasi perubahan satgas PPKS menjadi satgas PPKPT melalui surat dan sosmed LLDIKTI9.
3. Permintaan perubahan satgas PPKS PT menjadi satgas PPKPT melalui surat kepada pimpinan PT.

Kendala/Permasalahan

1. Jadwal narasumber (dir belmawa) yang padat menjadi kendala pelaksanaan sosialisasi awal tepat waktu.
2. Pergantian pejabat dir belmawa juga menjadi salah satu kendala keterlambatan sosialisasi.
3. Pergantian PIC dari puspeka menjadi belmawa berdampak pada keterlambatan fungsi LMS sebagai



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

sarana seleksi satgas baru.

4. Efisiensi Anggaran menyebabkan banyak kegiatan yang tidak berjalan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan dir belmawa baru.
2. Rencana Sosialisasi tetap dilakukan oleh ketua satgas 5dosa Ildikti9 (Kabag Umum).
3. Terus menagih perubahan satgas pada PTS.
4. Sosialisasi berkala melalui medsos Ildikti9.
5. Jemput bola dengan percepatan pembentukan satgas PPKPT.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

1. Mendorong PTS untuk melaporkan secara lengkap kegiatan tridharma dosen di luar kampus pada laman dashboard IKU PT.

Kendala/Permasalahan

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan workshop di 3 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara menyebabkan jumlah peserta dibatasi.
2. Banyak dosen yang memiliki kegiatan tridharma di luar kampus namun sampai sekarang tidak ada MoU yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra.
3. Kurang antusiasnya PTS untuk melaporkan dan enggan untuk melaporkan karena bukan merupakan kebutuhan dan sebelumnya kegiatan dosen di luar kampus dianggap dilarang.
4. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Perlunya persediaan anggaran yang tidak membatasi jumlah peserta sehingga PTS mendapat kouta peserta yang adil serta.
2. Perlunya memberikan pemahaman bahwa kegiatan dosen di luar kampus diperbolehkan selama mengikuti aturan yang berlaku serta MoU yang mengikat dan diketahui kemudian ditandatangani oleh pimpinan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan IDUKA.

Kendala/Permasalahan

1. Banyak program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra namun tidak ada Mou/MoA/IA yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra.
2. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

1. Fasilitasi peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi (*Match Making*).
2. Menghimbau perguruan tinggi untuk melaporkan data kerjasama pada aplikasi Laporkerma.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

1. Rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam mendukung penilaian indikator evaluasi kinerja internal pada dokumen SAKIP.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan yang dilakukan oleh Tim SAKIP kepada masing-masing PIC/penanggungjawab IKU.
3. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing PIC IKU.

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan program kementerian sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU perlu disesuaikan.
2. Pemberian reward atas penilaian kinerja sampai saat ini belum dilaksanakan sebagai salah satu penunjang dalam indikator evaluasi kinerja.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun pedoman pemberian reward atas penilaian kinerja tahun 2025.
2. Memantau pencapaian target kinerja setiap triwulan.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III.
2. Melakukan pendaftaran kontrak pada semester I.
3. Pengisian Capaian Output secara tepat waktu.
4. Melakukan revolving uang persediaan secara tepat waktu.

Kendala/Permasalahan

1. Indikator penyerapan Anggaran yang belum maksimal disebabkan karena adanya revisi anggaran dari beberapa kegiatan sehingga beberapa kegiatan belum bisa terlaksana, adanya perubahan anggaran (pemotongan anggaran, adanya restrukturisasi komponen RAB akibat dari perubahan alokasi DIPA 2025).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Fokus terhadap target penyerapan Triwulan III dengan memperhatikan target setiap jenis belanja agar dapat terpenuhi.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	100	229	Rp7.569.884.000	Rp2.466.948.704	32.59
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	15	50	Rp3.500.000	Rp1.545.300	44.15
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5244	5244	Rp203.634.729.000	Rp150.135.010.195	73.73
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	1	Rp9.450.000	Rp316.000	3.34
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp537.432.000	Rp195.927.000	36.46
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp194.185.214.000	Rp152.597.521.286	78.58
Total Anggaran					Rp405.940.209.000	Rp305.397.268.485	75.23

D. Rekomendasi Pimpinan

Capaian Triwulan II sangat memuaskan, seluruh target mampu dipenuhi bahkan dilewati. Untuk Triwulan berikutnya, rencana aksi sudah harus disusun paling lambat pekan pertama pada bulan pertama Triwulan III.

MAKASSAR, 24 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA
 Andi Lukman



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Triwula III



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan III Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93	%	88	90.09
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	87	%	86	87.50
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	44	%	44	44
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	10	%	8	6
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	79	%	77	73.60
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	48	%	48	57.14
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	67	%	67	54.91
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.3	Nilai	0	0



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Mengukur kualitas layanan pada layanan SIPINTER

Kendala/Permasalahan

1. Penilaian kualitas layanan terbatas pada layanan SIPINTER
2. Belum terbentuk tim khusus yang ditugaskan untuk menangani survei kepuasan masyarakat

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penyesuaian instrumen agar penilaian lebih objektif
2. Perlu dibentuk unit khusus yang ditugaskan untuk menangani survei kepuasan masyarakat
3. Melakukan kerjasama dengan tim independent seperti BPS, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang terpercaya

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi/Bimtek Penjaminan Mutu
2. Bimtek Penyusunan Borang
3. Pemetaan terhadap PTS yang tidak terakreditasi, untuk melakukan penggabungan/penyatuan
4. Peningkatan Kualitas Layanan di LLDIKTI

Kendala/Permasalahan

1. Anggaran Terbatas untuk menjangkau seluruh PTS
2. Anggaran Terbatas untuk penyusunan borang bagi PTS
3. PTS belum memahami proses dan prosedur Penyatuan / Penggabungan
4. Terdapat PTS Sanksi Pembinaan yang tidak dapat melakukan Penyatuan/Penggabungan
5. PTS telah melakukan Penggabungan/Penyatuan tidak segera mengajukan Akreditasi Institusi, disebabkan belum melakukan migrasi data

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong kegiatan dengan sistem mandiri
2. Mendorong PTS dengan sistem mandiri
3. Mendorong PTS yang Tidak Terakreditasi untuk Melakukan Penggabungan / Penyatuan
4. Percepatan migrasi data PTS penggabungan/penyatuan
5. Pengusulan Prodi baru harus terakreditasi PT
6. PTS yang melaksanakan wisuda harus terakreditasi PT

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Belum ada pelaporan data MBKM dari Perguruan Tinggi, dikarenakan adanya perubahan kebijakan MBKM baik dari nomenklatur maupun beberapa program menyesuaikan dengan kebijakan program saat ini yaitu Diktisaintek Berdampak

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan nomenklatur dari MBKM menjadi Diktisaintek Berdampak, sehingga beberapa program juga dilakukan penyesuaian
2. Belum ada laporan dari Perguruan Tinggi terkait kegiatan pembelajaran diluar program studi melalui program kegiatan Diktisaintek Berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

Menghimbau Perguruan Tinggi untuk segera melaporkan kegiatan pembelajaran diluar program studi melalui program kegiatan Diktisaintek Berdampak

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. Workshop Penyusunan Proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
2. Workshop Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
3. Workshop Penyusunan Proposal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW).

Kendala/Permasalahan

Pengukuran terkendala dikarenakan pada laman PDDIKTI yang sedang tahap pemeliharaan (maintenance)

Strategi/Tindak Lanjut

Sebelum melakukan kegiatan, TIM Kemahasiswaan melakukan koordinasi minimal 1 (satu) minggu sebelum jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)
2. Bimbingan Teknis Percepatan Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)
3. Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
4. Internalisasi Pencegahan Korupsi di Lingkup LLDIKTI Wilayah IX



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5. Revisi/Updating SK Satuan Tugas PPKPT dan Monitoring Pencegahan dan Penanganan 5 Dosa Perguruan Tinggi
6. monitoring Pencegahan dan Penanganan Lima Dosa Perguruan Tinggi (Anti Kekerasan Seksual, Anti Intoleransi, Anti Perundungan, Anti Korupsi, Dan Anti Narkoba) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX

Kendala/Permasalahan

1. Belum semua PTS berubah bentuk satgas PPKS menjadi satgas PPKPT
2. PTS belum dapat membentuk satgas PPKPT (satgas baru) terkendala aplikasi dari kementerian yang belum disempurnakan
3. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak terjangkau semua PT
4. Belum semua PT melaporkan perubahan bentuknya
5. PTS terkendala dana pelaksanaan kegiatan sebagai satgas
6. Belum semua PT melaporkan kegiatan pencegahan korupsi pada aplikasi 5 dosa LLDIKTI Wilayah IX
7. SDM PTS yang terbatas
8. Kurangnya dukungan pimpinan PTS kepada satgasnya

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong kegiatan dengan sistem mandiri
2. Senantiasa berkoordinasi dengan belmawa terkait aplikasi PPKPT
3. Mendorong pimpinan PTS untuk mendukung dan mengapresiasi kinerja satgasnya

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Mendorong PTS untuk melaporkan secara lengkap kegiatan tridharma dosen di luar kampus pada laman dashboard IKU PT

Kendala/Permasalahan

1. Kurang antusiasnya PTS untuk melaporkan dan enggan untuk melaporkan karena bukan merupakan kebutuhan dan sebelumnya kegiatan dosen di luar kampus dianggap dilarang
2. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT

Strategi/Tindak Lanjut

Mengoptimalkan sistem informasi IKU PT dalam melakukan monitoring pada setiap PTS lingkup LLDIKTI Wilayah IX

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Mendorong PT untuk melakukan kerjasama dengan IDUKA



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

1. Banyak program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra namun tidak ada Mou/MoA/IA yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra
2. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT

Strategi/Tindak Lanjut

1. Fasilitasi peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi (Match Making)
2. Menghimbau perguruan tinggi untuk melaporkan data kerjasama pada aplikasi Laporkerma

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

1. Rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam mendukung penilaian indikator evaluasi kinerja internal pada dokumen SAKIP
2. Rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam mendukung penilaian indikator evaluasi kinerja internal pada dokumen SAKIP
3. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing PIC IKU

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan program kementerian sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU perlu disesuaikan
2. Pemberian reward atas penilaian kinerja sampai saat ini belum dilaksanakan sebagai salah satu penunjang dalam indikator evaluasi kinerja

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun pedoman pemberian reward atas penilaian kinerja
2. Memantau pencapaian target kinerja setiap triwulan

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Koordinasi dengan PIC kegiatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan Triwulan III
2. Melakukan update RPD Triwulan III pada awal bulan Juli
3. Pengisian Capaian Output secara tepat waktu
4. Melakukan revolving uang persediaan secara tepat waktu

Kendala/Permasalahan

1. Sisa Anggaran pada Triwulan III masih cukup besar
2. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan adanya revisi anggaran dari beberapa kegiatan sehingga bbrp kegiatan belum bisa dilaksanakan, adanya kebijakan efisiensi dari Kementerian menyebabkan perubahan anggaran (pemotongan anggaran) serta restrukturisasi komponen RAB akibat dari perubahan alokasi DIPA 2025
3. Adanya tambahan alokasi anggaran dari Kementerian sebesar 1 Milyar pada bulan September sehingga terdapat beberapa tambahan kegiatan yang harus dilaksanakan pada



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Strategi/Tindak Lanjut

1. Fokus terhadap target penyerapan Triwulan IV dengan memperhatikan target setiap jenis belanja agar dapat terpenuhi
2. Melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan
3. Menjaga deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5%
4. Melakukan kontrol target penggunaan transaksi KKP Triwulan IV

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	190	229	Rp7.569.884.000	Rp2.881.256.444	38.06
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	40	50	Rp3.500.000	Rp1.757.800	50.22
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5244	5244	Rp203.634.729.000	Rp151.102.952.895	74.20
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	1	Rp9.450.000	Rp316.000	3.34
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp537.432.000	Rp197.572.750	36.76
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp194.185.214.000	Rp152.945.847.086	78.76
Total Anggaran					Rp405.940.209.000	Rp307.129.702.975	75.66

D. Rekomendasi Pimpinan

Target untuk triwulan selanjutnya akan menjadi target tahun 2025, mohon untuk lebih diperhatikan dan koordinasi lintas tim kerja lebih baik lagi.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



MAKASSAR, 3 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA

Andi Lukman



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

4. Triwula IV



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan IV Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93	%	93	90.16
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	87	%	87	87.83
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	44	%	44	18.47
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	10	%	10	1.30
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	79	%	79	80.18
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	48	%	48	55.80
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	67	%	67	42
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	AA	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.3	Nilai	99.3	99.99



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Evaluasi Standar Pelayanan Publik Tahun 2025

Kendala/Permasalahan

1. Penilaian kualitas layanan terbatas pada layanan SIPINTER

Strategi/Tindak Lanjut

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik ke seluruh pegawai LLDIKTI IX
2. Sosialisasi sistem reward and punishment untuk pegawai LLDIKTI IX
3. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada stakeholder yang lebih masif
4. Pembentukan tim khusus/kerjasama dengan akademi/praktisi untuk pelaksanaan survei kepuasan layanan yang mencakup seluruh aplikasi layanan
5. Pembentukan pedoman internal untuk survei kepuasan layanan
6. Pelatihan pelayanan prima berkala
7. Sosialisasi Anti Korupsi berkala

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Penggabungan/Penyatuan PT
2. Workshop Akreditasi Instrument 4.0 dan Sapto 2.0
3. Pendampingan Akreditasi Mandiri

Kendala/Permasalahan

1. Migrasi data pada PDDIKTI belum selesai
2. PT belum memahami pengajuan Akreditasi pasca penggabungan
3. PT masih harus menyesuaikan dengan aplikasi baru
4. Data Dosen pada prodi di PT tidak mencukupi
5. PT masih kesulitan dalam membuat laporan Evaluasi diri

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendampingan migrasi data bagi PT penggabungan/penyatuan
2. Workshop/Bimtek Akreditasi khusus bagi PT penggabungan/penyatuan
3. Bimtek mandiri bagi PT yang belum memahami aplikasi baru
4. Mendorong perekrutan dosen baru bagi prodi yang dosennya tidak mencukupi
5. Bimtek mandiri dalam penyusunan Instrumen Akreditasi

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

1. Belum ada pelaporan data MBKM dari Perguruan Tinggi, dikarenakan adanya perubahan kebijakan MBKM baik dari nomenklatur maupun beberapa program menyesuaikan dengan kebijakan program saat ini yaitu Diktisaintek Berdampak

Kendala/Permasalahan

1. Kebijakan MBKM diawal tahun 2025 diganti dengan Kampus berdampak, sehingga sebahagian perguruan tinggi tidak lagi melanjutkan program MBKM di kampus

Strategi/Tindak Lanjut

1. Di tahun 2026 berdasarkan rancangan IKU 5, terdapat kebijakan yang mengharuskan perguruan tinggi untuk tetap bisa melanjutkan kegiatan MBKM, sehingga LLDIKTI diharapkan bisa menyiapkan kegiatan yang bisa mendorong perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan MBKM.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. Belum ada pelaporan data MBKM dari Perguruan Tinggi, dikarenakan adanya perubahan kebijakan MBKM baik dari nomenklatur maupun beberapa program menyesuaikan dengan kebijakan program saat ini yaitu Diktisaintek Berdampak
2. Pembinaan program kreativitas mahasiswa (PKM)

Kendala/Permasalahan

1. Kebijakan MBKM diawal tahun 2025 diganti dengan Kampus berdampak, sehingga sebahagian perguruan tinggi tidak lagi melanjutkan program MBKM di kampus
2. Penambahan jumlah persentase data mahasiswa berprestasi belum terjadi kenaikan disebabkan data mahasiswa berprestasi belum diberikan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek

Strategi/Tindak Lanjut

1. Di tahun 2026 berdasarkan rancangan IKU 5, terdapat kebijakan yang mengharuskan perguruan tinggi untuk tetap bisa melanjutkan kegiatan MBKM, sehingga LLDIKTI diharapkan bisa menyiapkan kegiatan yang bisa mendorong perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan MBKM.
2. Membuat Permohonan data mahasiswa berprestasi pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek
3. Sebelum melaksanakan kegiatan, TIM Kemahasiswaan melakukan koordinasi 1 minggu sebelum jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi Permendikbudristek No 55 Tahun 2024
2. Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Kolaborasi Itjen Kemdiktisaintek)
3. Internalisasi Pencegahan Korupsi di Wilayah LLDIKTI IX (Kolaborasi Itjen Kemdiktisaintek)



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

4. Bimbingan Teknis Percepatan Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)
5. Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)
6. "Satu Komitmen, Seribu Aksi: Perguruan Tinggi Bersatu Wujudkan Kampus Tanpa Kekerasan"

Kendala/Permasalahan

1. PTS cenderung hanya fokus pada pembentukan Satgas PPKPT, sementara aspek antitoleransi dan perundungan belum terintegrasi secara merata
2. Belum semua PTS memahami bahwa SOP penanganan harus mencakup aspek Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Perundungan, Diskriminasi & Intoleransi, Kebijakan yang Mengandung Kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual
3. Kegiatan masih didominasi oleh isu PPKPT, sehingga program antikorupsi dan antinarkoba kurang mendapatkan porsi sosialisasi yang memadai di tingkat pimpinan PTS
4. Fokus energi PTS terserap pada transisi teknis aplikasi (Puspeka ke Belmawa), sehingga mengabaikan persiapan regulasi antitoleransi dan antiperundungan di tingkat kampus
5. Kurangnya pemahaman bahwa Satgas PPKPT memiliki peran strategis dalam mencegah radikalisme (toleransi) dan perundungan, bukan sekadar menangani kasus kekerasan seksual
6. Kampanye masih bersifat tunggal (fokus pada kekerasan), sehingga pimpinan PTS belum melihat kaitan erat antara kesejahteraan satgas dengan keberhasilan implementasi antinarkoba dan antikorupsi

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menggabungkan isu Kekerasan (Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Perundungan, Diskriminasi & Intoleransi, Kebijakan yang Mengandung Kekerasan) dalam satu paket sosialisasi untuk efisiensi implementasi di PTS
2. Mengevaluasi penyusunan SOP penanganan kekerasan dan yang mencakup mekanisme penanganan lintas isu (4+1) agar PTS dapat memenuhi indikator IKU 2.3 secara sekaligus
3. Menyelipkan sesi Antikorupsi & Antinarkoba pada setiap pertemuan/bimtek PPKPT, serta mewajibkan pencantuman komitmen antikorupsi dalam dokumen MoU kerja sama antara LLDIKTI IX dan PTS
4. Memberikan pendampingan teknis tidak hanya untuk sistem aplikasi Satgas (koordinasi intensif dengan Direktorat Belmawa untuk sinkronisasi data), tetapi juga memberikan checklist regulasi mandiri bagi PTS agar mereka menyadari kewajiban memenuhi poin IKU lainnya (Antinarkoba & Antikorupsi)
5. Mengarahkan PT untuk Menggalakkan kampanye digital melalui media sosial yang menyasar mahasiswa/dosen dan menyelenggarakan forum berbagi praktik baik antar-Satgas PPKPT
6. Mempertegas komitmen pimpinan PTS terhadap kelima poin IKU 2.3 dalam satu aksi kolektif yang berkelanjutan

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

1. Mendorong PTS untuk melaporkan secara lengkap kegiatan tridharma dosen di luar kampus pada laman dashboard IKU PT

Kendala/Permasalahan

1. Kurang antusiasnya PTS untuk melaporkan dan enggan untuk melaporkan karena bukan merupakan kebutuhan dan sebelumnya kegiatan dosen di luar kampus dianggap dilarang
2. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan sistem informasi IKU PT dalam melakukan monitoring pada setiap PTS lingkup LLDIKTI Wilayah IX

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Mendorong PT untuk melakukan kerjasama dengan IDUKA

Kendala/Permasalahan

1. Banyak program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra namun tidak ada Mou/MoA/IA yang dikeluarkan dari PTS maupun pihak mitra
2. Belum terintegrasinya data kerjasama PTS yang ada di sistem laporkerma dengan dashboard IKU-PT

Strategi/Tindak Lanjut

1. Fasilitasi peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi (Match Making)
2. Menghimbau perguruan tinggi untuk melaporkan data kerjasama pada aplikasi Laporkerma

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

1. Rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam mendukung penilaian indikator evaluasi kinerja internal pada dokumen SAKIP
2. Studi Tiru Implementasi SAKIP pada Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI
3. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing PIC IKU

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan program kementerian sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU perlu disesuaikan
2. Pemberian reward atas penilaian kinerja sampai saat ini belum dilaksanakan sebagai salah satu penunjang dalam indikator evaluasi kinerja

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun pedoman pemberian reward atas penilaian kinerja
2. Memantau pencapaian target kinerja setiap triwulan

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



1. Monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala
2. Monitoring Realisasi Anggaran dan Capaian Output setiap bulan
3. Koordinasi aktif antara tim perencana, pelaksana kegiatan dan keuangan
4. Pertanggungjawaban UP dan TUP secara tepat waktu
5. Mendorong penggunaan transaksi KKP sehingga mencapai target
6. Menyelesaikan seluruh tagihan secara tepat waktu
7. Kepatuhan terhadap ketentuan dan batas waktu penyampaian SPM untuk menghindari adanya disepensi SPM di akhir tahun anggaran
8. Mengajukan TUP sesuai kebutuhan riil dan jangka waktu penggunaannya, serta mempercepat penyampaian SPJ TUP
9. Meminimalkan penyetoran sisa UP dan TUP di akhir tahun

Kendala/Permasalahan

1. Penyerapan anggaran yang belum merata sehingga masih terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun
2. Proses revisi yang memerlukan waktu dan berdampak pada jadwal kegiatan dan realisasi anggaran
3. Adanya tambahan alokasi anggaran dari Kementerian sebesar 1 Milyar pada bulan September sehingga terdapat beberapa tambahan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Triwulan IV

Strategi/Tindak Lanjut

1. Fokus terhadap target penyerapan setiap triwulan dengan memperhatikan target setiap jenis belanja agar dapat terpenuhi
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan dan menghindari adanya penumpukan realisasi diakhir tahun anggaran
3. Rapat koordinasi setiap bulan dengan pimpinan dan tim kerja
4. Menjaga deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5%
5. Meminimalisir adanya revisi anggaran dengan melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal
6. Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran dan keuangan negara.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	229	229	Rp7.569.884.000	Rp4.158.898.534	54.94
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	50	50	Rp3.500.000	Rp3.474.300	99.27



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5244	5244	Rp202.091.729.000	Rp200.961.341.126	99.44
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp9.450.000	Rp4.366.000	46.20
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp537.432.000	Rp283.414.450	52.73
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	Rp193.061.214.000	Rp187.522.887.695	97.13
Total Anggaran					Rp403.273.209.000	Rp392.934.382.105	97.44

D. Rekomendasi Pimpinan

Capaian 2025 harap dijadikan evaluasi untuk penentuan target baru 2026 serta rencana aksi yang berdampak langsung pada pencapaian target tahun 2026.

Makassar, 14 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
 Tinggi Wilayah IX
 Andi Lukman



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



C. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar
Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	26.1
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	89.1

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

a. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan terdapat IKK yang menyebut kegiatan untuk Tahun 2023 dan 2024 yaitu IKK 4.1 dan IKK 4.2

b. Dokumen draf Renstra masih terdapat frasa "Renstra Kemendikbud" dan masih menggunakan referensi Merdeka Belajar dimana saat ini referensi yang digunakan adalah Diktisaintek Berdampak

B. Pengukuran Kinerja

a. Laporan Evaluasi Triwulan ke-2 Tahun 2025 belum dilampirkan oleh LL Dikti IX Makassar

b. Hasil wawancara belum menunjukkan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang pada LL Dikti IX Makassar

c. Belum ada acuan atau metode dalam pemberian Reward and Punishment di lingkungan LL Dikti IX Makassar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

C. Pelaporan Kinerja

Target kinerja pada IKK 1.1 belum menyesuaikan dengan realisasi target kinerja pada LAKIN Tahun 2024

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi AKIP pada LL Dikti IX Makassar sudah memenuhi kriteria

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

a. Agar tim penyusun Evaluasi AKIP LL Dikti IX Makassar segera memperbaiki isi draf Renstra dan memformalkannya kepada pimpinan

b. Agar tim penyusun evaluasi AKIP LL Dikti IX Makassar menyesuaikan kembali Bab I dalam draf Renstra sesuai dengan referensi Kementerian saat ini

B. Pengukuran Kinerja

a. Agar segera melampirkan dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan yang belum lengkap

b. Agar wawancara dilakukan secara berjenjang sehingga sesuai dengan pemantauan

c. Agar segera disusun metode atau acuan dalam pemberian Reward and Punishment di lingkungan LL Dikti IX Makassar

C. Pelaporan Kinerja

Agar segera menyesuaikan target kinerja di tahun 2025 khususnya IKK 1.1 sesuai dengan capaian hasil kinerja di LAKIN Tahun 2024

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar terus ditingkatkan kompetensi yang memadai dalam Evaluasi AKIP di lingkungan LL Dikti IX Makassar

Jakarta, 10 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I
Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



D. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA LLDIKTI WILAYAH IX TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LLDIKTI Wilayah IX untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen LLDIKTI Wilayah IX. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Makassar, 27 Januari 2026



Agus Halid

NIP.197508262005011001